

# DASAR ILMU SOSIOLOGI

Buku ini membahas tentang Dasar-Dasar Sosiologi, Bidang Kajian Sosiologi, Perspektif Utama dalam Sosiologi, Konsep Interaksi Sosial, Sosialisasi, Pola Sosialisasi, Stratifikasi Sosial, Dimensi Stratifikasi Sosial, Kelompok Sosial, Kontrol Sosial, Tatanan Sosial, Institusi Pendidikan, Institusi Politik, dan Perubahan Sosial dalam Masyarakat.



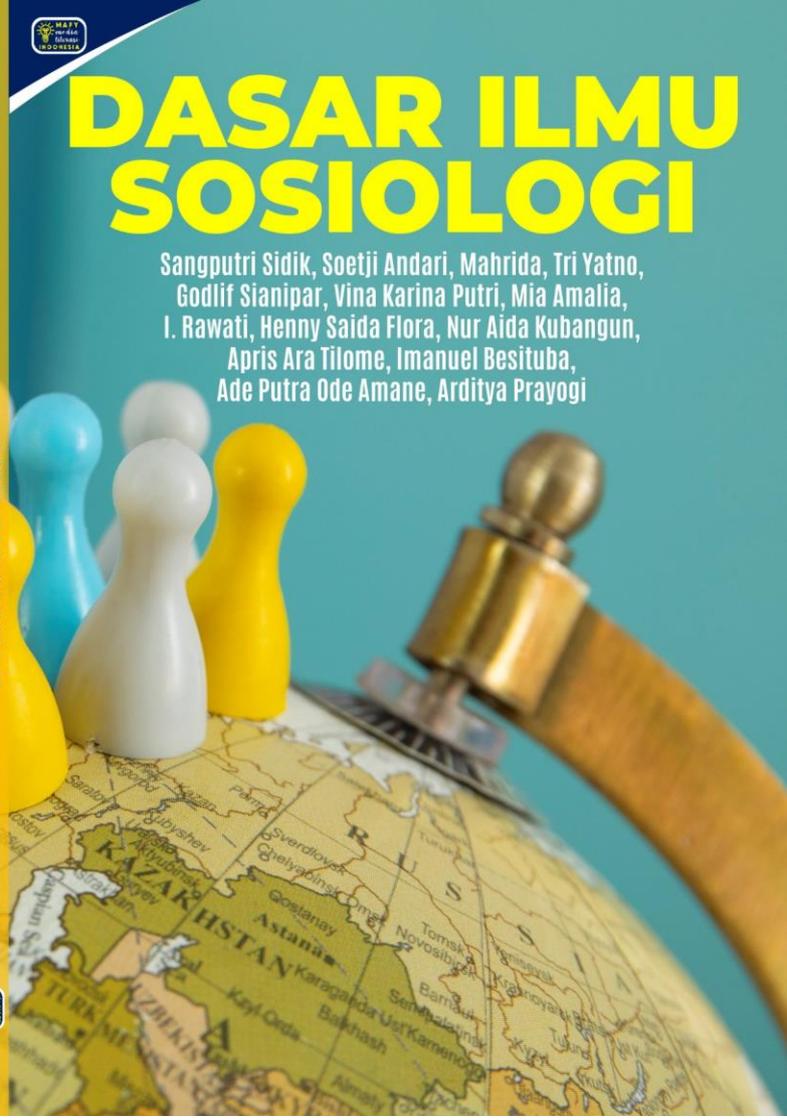
PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA  
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023  
Email : [penerbitmafya@gmail.com](mailto:penerbitmafya@gmail.com)  
Website : [penerbitmafya.com](http://penerbitmafya.com)  
FB : Penerbit Mafy



# DASAR ILMU SOSIOLOGI

Sangputri Sidik, Soetji Andari, Mahrida, Tri Yatno,  
Godlif Sianipar, Vina Karina Putri, Mia Amalia,  
I. Rawati, Henny Saida Flora, Nur Aida Kubangun,  
Apris Ara Tilome, Imanuel Besituba,  
Ade Putra Ode Amane, Arditya Prayogi

DASAR ILMU SOSIOLOGI



**Dasar Ilmu**  
**Sosiologi**

## **UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggunaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggunaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# Dasar Ilmu Sosiologi

## Penulis:

Sangputri Sidik | Soetji Andari | Mahrida | Tri Yatno  
Godlif Sianipar | Vina Karina Putri | Mia Amalia  
I. Rawati | Henny Saida Flora | Nur Aida Kubangun  
Apris Ara Tilome | Imanuel Besituba  
Ade Putra Ode Amane | Arditya Prayogi



# Dasar Ilmu Sosiologi

**Penulis:**

Sangputri Sidik | Soetji Andari | Mahrida | Tri Yatno  
Godlif Sianipar | Vina Karina Putri | Mia Amalia  
I. Rawati | Henny Saida Flora | Nur Aida Kubangun  
Apris Ara Tilome | Imanuel Besituba  
Ade Putra Ode Amane | Arditya Prayogi

**Editor:**

**Andi Asari**

**Desainer:**

Tim Mafy

**Sumber Gambar Cover:**

[www.freepik.com](http://www.freepik.com)

**Ukuran:**

vi, 270 hlm, 15,5 cm x 23 cm

**ISBN:**

978-623-8470-67-9

Cetakan Pertama:

November 2023

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: [www.penerbitmafy.com](http://www.penerbitmafy.com)

E-mail: [penerbitmafy@gmail.com](mailto:penerbitmafy@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

---

**Segala puji syukur** kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Dasar Ilmu Sosiologi. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini.

Buku ini membahas tentang Dasar-Dasar Sosiologi, Bidang Kajian Sosiologi, Perspektif Utama dalam Sosiologi, Konsep Interaksi Sosial, Sosialisasi, Pola Sosialisasi, Stratifikasi Sosial, Dimensi Stratifikasi Sosial, Kelompok Sosial, Kontrol Sosial, Tatanan Sosial, Institusi Pendidikan, Institusi Politik, dan Perubahan Sosial dalam Masyarakat.

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat

mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

**Penulis**



## DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB 1 “DASAR-DASAR SOSIOLOGI”</b>	1
1.1. Definisi Sosiologi	1
1.2. Perkembangan Ilmu Sosiologi	5
<b>BAB 2 “BIDANG KAJIAN SOSIOLOGI”</b>	23
2.1. Pendahuluan: Kajian Sosiologi	23
2.2. Kajian Sosiologi Di Era Masyarakat 5.0	26
2.3. Aspek-Aspek Studi Sosiologis	29
2.4. Relasional dan Interaksi Sosial	34
2.5. Pola Perilaku Masyarakat Pada Konteks Sosiologi	40

<b>BAB 3 “PERSPEKTIF UTAMA DALAM SOSIOLOGI”</b>	<b>45</b>
3.1. Pendahuluan.	45
3.2. Perspektif Struktural Fungsional.	47
3.3. Perspektif Konflik	57
3.4. Perspektif Interaksionisme Simbolik	69
3.5. Penutup	78
<b>BAB 4 “KONSEP INTERAKSI SOSIAL”</b>	<b>85</b>
4.1. Pendahuluan	85
4.2. Komponen Interaksi Sosial	86
4.3. Sifat Interaksi sosial	95
<b>BAB 5 “SOSIALISASI”</b>	<b>99</b>
5.1 Pendahuluan	99
5.2 Pentingnya Pengalaman Sosial	100
5.3 Memahami Proses Sosialisasi	104
5.4 Agen Sosialisasi	110
5.5 Lembaga Resosialisasi	112
<b>BAB 6 “POLA SOSIALISASI”</b>	<b>117</b>
6.1 Pengertian Sosialisasi	117
6.2 Jenis sosialisasi	118
6.3 Tipe Sosialisasi	120
6.4 Pola Sosialisasi	121
6.5 Agen Sosialisasi	122
<b>BAB 7 “STRATIFIKASI SOSIAL”</b>	<b>127</b>
7.1. Pendahuluan	127
7.2. Pengertian Stratifikasi Sosial	129
7.3. Bentuk-Bentuk Stratifikasi Sosial	132
7.4. Sistem dan Dimensi Stratifikasi Sosial	133

7.5. Bentuk-Bentuk Stratifikasi Sosial _____	133
7.6. Sifat Statifikasi Sosial _____	135
7.7. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Stratifikasi Sosial _____	136
<b>BAB 8 “DIMENSI STRATIFIKASI SOSIAL” _____</b>	<b>143</b>
8.1. Privilege, Prestise dan Power _____	145
8. 2. Kelas Sosial _____	150
8.3. Bentuk-Bentuk Stratifikasi Sosial _____	154
8.4. Cara Mempelajari Stratifikasi Sosial _____	157
8.5. Rangkuman _____	159
<b>BAB 9 “KELOMPOK SOSIAL” _____</b>	<b>163</b>
9.1. Pengertian Kelompok Sosial _____	163
9.2 Proses Terbentuknya Kelompok Sosial _____	165
9.3 Macam-macam Kelompok Sosial _____	166
9.4. Nilai dan Norma Kelompok Sosial _____	177
<b>BAB 10 “KONTROL SOSIAL” _____</b>	<b>179</b>
10.1. Pendahuluan _____	179
10.2. Pengertian Kontrol Sosial Menurut Para Ahli _____	181
10.3. Fungsi Kontrol Sosial _____	184
10.4. Pranata Adat sebagai Media Kontrol Sosial _____	187
10.5. Kesimpulan _____	190
<b>BAB 11 “TATANAN SOSIAL” _____</b>	<b>193</b>
11.1 Pengantar Tatanan Sosial _____	193
11.2 Definisi Tatanan Sosial _____	194
11.3 Pentingnya Memahami Tatanan Sosial dalam Masyarakat _____	195
11.4 Nilai dan Norma dalam Masyarakat _____	197
11.4 Peran Norma Dan Nilai Dalam Mengatur Perilaku Masyarakat _____	198
11.5 Contoh Norma Dan Nilai Dalam Budaya Tertentu _____	200

11.6 Kesimpulan	201
<b>BAB 12 “INSTITUSI PENDIDIKAN”</b>	<b>203</b>
12.1 Pendahuluan	203
12.2 Pengertian Institusi Pendidikan	206
12.3 Jenis Institusi Pendidikan	207
12.4 Peran Institusi Pendidikan	210
<b>BAB 13 “INSTITUSI POLITIK”</b>	<b>215</b>
13.2. Pengertian Institusi Politik	216
13.3. Fungsi dan Peran Institusi Politik dalam Masyarakat	217
13.4. Pentingnya Memahami Institusi Politik dalam Konteks Sosiologi Politik	219
13.5. Lembaga-Lembaga Politik	220
13.6. Etika dan Akuntabilitas dalam Institusi Politik	228
13.7. Etika Politik	229
13.8. Akuntabilitas Publik	230
<b>BAB 14 “PERUBAHAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT”</b>	<b>237</b>
14.1 Pendahuluan	237
14.2 Dimensi Perubahan Sosial	240
14.3 Agen Perubahan	244
14.4 Penutup	246
<b>Biodata Penulis</b>	<b>251</b>

# BAB 1

## “DASAR-DASAR SOSIOLOGI”

---



**Sangputri Sidik**  
Universitas Negeri Manado

### 1.1. Definisi Sosiologi

**S**ejak awal, ilmu-ilmu sosial tidak terbatas pada definisi atau batasan topik yang eksak. Berbeda dengan ilmu eksakta yang memiliki rumus yang telah ditentukan dengan pasti, ilmu sosial memiliki rumusan yang tidak pasti karena berfokus pada perilaku manusia yang selalu berubah seiring waktu. Walaupun begitu, studi tentang perilaku manusia tetap dianggap sebagai bagian dari ilmu sosial karena mengikuti metode ilmiah dan memenuhi kriteria sebagai disiplin ilmu.

Situasi yang serupa juga berlaku dalam bidang sosiologi. Oleh karena itu, hingga saat ini tidak ada definisi yang pasti atau standar yang baku untuk menggambarkan sosiologi. Namun, ini tidak berarti bahwa para pelajar sosiologi tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang bidang ini. Ada kesamaan dalam berbagai definisi sosiologi yang diajukan oleh para ahli, yaitu sosiologi dilihat sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari interaksi antara individu dan kelompok manusia serta dampaknya pada pembentukan struktur sosial, termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan yang dianut oleh kelompok tersebut.

Asal usul kata "sosiologi" dapat ditelusuri ke bahasa Latin, yaitu dari kata "socius" yang berarti "teman", dan bahasa Yunani, yaitu dari kata "logos" yang berarti "cerita". Istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam buku "*Cours De Philosophie Positive*" yang ditulis oleh August Comte (1798-1857). Konsep sosiologi telah ada selama berabad-abad, bahkan ribuan tahun yang lalu. Namun, sebagai disiplin ilmu yang memfokuskan pada kajian masyarakat, sosiologi baru benar-benar berkembang di Eropa pada awal abad ke-19, di mana Eropa dapat dianggap sebagai pusat peradaban dunia. Pada periode tersebut, para cendekiawan mulai menyadari pentingnya memahami kondisi dan perubahan sosial secara lebih mendalam. Mereka berusaha membangun teori-teori sosial berdasarkan karakteristik masyarakat pada setiap tahap perkembangan manusia (Soekanto, 2010). Untuk memahami lebih lanjut tentang sosiologi, kita perlu merujuk pada berbagai pandangan ahli di bidang ini.

1. Pitirim Sorokin mendefinisikan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang memfokuskan diri pada penyelidikan mengenai hubungan timbal balik dan dampak antara berbagai gejala sosial yang beragam. Ini mencakup interaksi antara fenomena ekonomi dan agama, dinamika antara keluarga dan moral, perhubungan antara hukum

dan ekonomi, dinamika gerakan sosial dan politik, dan sejumlah aspek lainnya. Sosiologi juga mempertimbangkan hubungan dan pengaruh timbal balik antara fenomena sosial dan fenomena yang bukan bersifat sosial, seperti aspek geografis dan fisiologis, serta ciri-ciri umum yang berlaku untuk semua jenis gejala sosial.

2. Max Weber yang lebih berorientasi pada behavioralis (pendekatan tingkah laku) menekankan sosiologi sebagai ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial.
3. Roucek dan Warren menyatakan bahwa sosiologi adalah disiplin yang meneliti interaksi manusia di dalam kelompok.
4. William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial.
5. William Kornblum mendefinisikan sosiologi sebagai upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi.
6. Allan Johnson mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut memengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat di dalamnya memengaruhi sistem itu.
7. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemantri membatasi definisi sosiologi sebagai cabang ilmu yang meneliti struktur sosial, yang mencakup semua aspek penting dalam kehidupan sosial seperti norma-norma sosial, institusi sosial, kelompok sosial, dan tingkatan sosial. Mereka juga memeriksa interaksi sosial antara berbagai aspek kehidupan bersama, seperti ekonomi, politik, hukum, agama, dan lainnya, termasuk perubahan-perubahan sosial

8. Soerjono Soekamto mengemukakan bahwa fokus sosiologi adalah pada aspek-aspek umum dalam kehidupan masyarakat, dengan upaya untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam kehidupan sosial masyarakat.

Terdapat berbagai definisi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya, ada titik kesamaan di antara definisi yang dapat ditemukan. Dari berbagai definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa meskipun ada variasi dalam pandangan, ada kesamaan inti yang dapat ditemukan di antara definisi di atas.

1. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari: manusia yang hidup dalam kelompok yang disebut masyarakat;
2. Pola-pola hubungan antara manusia baik secara individu maupun secara kelompok; hubungan manusia dengan lembaga-lembaga sosial, seperti norma-norma dan kaidah-kaidah sosial;
3. Dan pola-pola kehidupan manusia kaitannya dengan kondisi lingkungannya.

Oleh karena itu, inti dari batasan sosiologi adalah kajian tentang interaksi antara individu-individu dalam suatu komunitas yang menghasilkan dinamika hubungan manusia-manusia dengan tujuan menghindari konflik antar-individu, serta antara individu dan kelompoknya. Secara singkat, sosiologi dapat digambarkan sebagai ilmu yang meneliti pola-pola hubungan antarmanusia (Setiadi, 2011). Salah satu aspek yang menarik bagi para ilmuwan sosiologi adalah menganalisis fenomena sosial yang termanifestasikan dalam pola-pola interaksi antarmanusia:

1. Manusia, sebagai makhluk sosial, cenderung untuk berkolaborasi atau bersatu dalam kelompok demi mencapai tujuan hidupnya. Dalam dinamika kelompok ini, terlihat adanya fenomena kerjasama saling membantu, namun di sisi lain, konflik dan pertentangan juga dapat

muncul, bahkan bisa berkembang menjadi konflik berskala besar seperti perang.

2. Perbedaan dalam tatanan aturan sosial yang diterapkan oleh berbagai kelompok mengakar pada nilai dan norma yang berbeda dalam masing-masing kelompok, menyebabkan variasi dalam peraturan yang berlaku.
3. Dampak dari pola hubungan sosial ini adalah pembentukan struktur sosial berlapis hierarkis yang menciptakan kelas-kelas sosial, sementara juga terdapat pengelompokan horizontal yang menghasilkan keragaman dalam kelompok sosial.
4. Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dalam pola kehidupan sosial seiring berjalannya waktu, dan perubahan ini dapat berpengaruh pada perilaku manusia. Yang menarik, tidak semua perubahan selalu berdampak positif, karena terkadang perubahan dalam kehidupan manusia dapat mengarah pada destruksi kelompok sosial itu sendiri, bahkan hingga tingkat negara dan bangsa.
5. Kehidupan sosial sering kali dipengaruhi oleh variasi perilaku dan karakter antara individu-individu, yang mencampurkan karakteristik mereka dalam konteks kelompok yang lebih besar. Perbedaan dan kesamaan ini akhirnya membentuk situasi sosial tertentu, yang bisa mencakup kerja sama maupun konflik (Setiadi, 2011)

## **1.2. Perkembangan Ilmu Sosiologi**

### **1.2.1. Sosiologi Klasik**

Sosiologi merupakan cabang dalam ilmu sosial yang masih relatif muda dalam usianya, meskipun telah mengalami perkembangan yang signifikan. Yang menarik adalah bagaimana perkembangan ilmu ini dimulai. Pada awalnya, banyak individu memeriksa masyarakat dengan fokus pada hal-hal yang menarik perhatian publik, seperti perang, kejahatan,

kekuasaan kelompok yang berkuasa, seperti pemerintah atau raja, fenomena keagamaan, dan sejenisnya. Dari pendekatan ini, pengamat ilmu sosial mulai mengembangkan konsep filsafat sosial yang menguraikan harapan, struktur, dan gambaran masyarakat yang diinginkan atau dianggap sebagai ideal.

Berkaitan dengan harapan akan masyarakat yang ideal, terbentuklah formulasi tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang seharusnya diikuti oleh setiap individu dalam interaksinya dengan sesama manusia dalam konteks kehidupan manusia. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut bertujuan menciptakan kehidupan sosial yang penuh kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Namun, harapan-harapan tersebut tidak selalu dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata, sehingga timbul kesenjangan antara aspirasi dan kenyataan. Untuk mengimplementasikan harapan-harapan tersebut, para ilmuwan perlu mengembangkan teori-teori yang sistematis dan bersifat objektif, terlepas dari penilaian pribadi yang mempelajarinya, terutama dalam hal penilaian subjektif mengenai nilai positif dan negatif dari realitas yang ada.

Di masa lalu, filsafat merupakan akar dari seluruh pengetahuan, artinya semua disiplin ilmu saat ini pada dasarnya berasal dari cabang filsafat. Sebagai akibatnya, filsafat bisa dianggap sebagai nenek moyang semua bidang ilmu (*master sciantiarum*). Namun, perlu dicatat bahwa filsafat cenderung lebih subyektif karena itu merupakan disiplin pengetahuan yang bergantung pada pikiran manusia, yang membuatnya memiliki landasan ilmiah yang terbatas. Sebaliknya, ilmu pengetahuan harus didasarkan pada bukti empiris, yaitu fakta-fakta yang dapat diamati, diuji, didengar, dan dirasakan dalam realitas. Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan filsafat berkembang secara terpisah. Perbedaan ini didasarkan pada filsafat yang lebih menekankan pada pemikiran manusia dan tingkat pengetahuan individu, bukan pada kenyataan yang dapat diobservasi. Sementara ilmu

pengetahuan, dengan sifatnya yang lebih objektif, harus terbebas dari intervensi manusia karena kebenaran dalam ilmu pengetahuan selalu merujuk pada objek atau fakta nyata yang dapat diamati, diuji, didengar, dan dirasakan. Di abad ke-19, beberapa cabang ilmu pengetahuan seperti psikologi (yang mempelajari aspek-aspek kejiwaan manusia), fisika, biologi, dan sosiologi awalnya adalah bagian dari domain filsafat sebelum akhirnya berkembang menjadi disiplin ilmu yang mandiri (Siahaan, 1986).

Sosiologi, sebagai cabang ilmu yang menyelidiki interaksi antara individu dengan individu lainnya dan antara kelompok dengan kelompok lainnya, berasal dari berbagai pemikiran tentang struktur sosial. Perkembangan awal sosiologi dapat ditelusuri hingga periode di mana terjadi Revolusi Perancis dan Revolusi Industri di Inggris, yang memicu perubahan mendasar dalam masyarakat Eropa. Sebelum terjadinya revolusi, Eropa berada dalam pola kehidupan yang bersifat tradisional, yang ditandai oleh sistem sosial feodal. Kondisi feodal ini dapat dikenali melalui sejumlah indikator dalam masyarakat.

Pentingnya periode ini dalam sejarah sosiologi adalah karena perubahan sosial yang signifikan yang terjadi pada saat itu menjadi sumber inspirasi utama bagi para pemikir awal dalam bidang sosiologi. Revolusi Perancis, misalnya, menghadirkan perubahan besar dalam tatanan politik dan sosial, sementara Revolusi Industri di Inggris menciptakan transformasi ekonomi yang mengubah cara masyarakat bekerja dan hidup. Semua ini menjadi titik awal bagi pengembangan pemahaman tentang masyarakat dan hubungan sosial yang kemudian menjadi fokus sosiologi sebagai ilmu (Siahaan, 1986). Berikut ini dapat dilihat beberapa indikator masyarakat yang berada pada kondisi feodalistik:

Kehidupannya sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan (agraris). Ini berarti bahwa sumber penghidupannya terutama berasal dari sektor pertanian dan

perkebunan, yang merupakan bagian penting dalam kehidupannya.

Klasifikasi kelas sosial selalu terkait dengan faktor kepemilikan tanah, sehingga individu yang memiliki tanah yang luas atau memiliki kedudukan sebagai tuan tanah menduduki posisi tinggi dalam struktur sosial. Ini mengindikasikan bahwa dalam masyarakat ini, kepemilikan tanah adalah faktor utama yang menentukan status sosial seseorang.

Status sosial dalam masyarakat dibedakan melalui penggunaan gelar-gelar kehormatan seperti "raden" di Jawa, "sir" di Inggris, dan sejenisnya. Gelar-gelar ini digunakan untuk membedakan individu berdasarkan kedudukan sosial atau kebangsawanan mereka, dan berfungsi sebagai tanda penghormatan atau pengakuan atas posisi mereka dalam hierarki sosial.

Pola-pola hubungan ekonomi lebih banyak dipengaruhi oleh interaksi antara tuan tanah dan buruh tani, petani penggarap, serta penyewa tanah pertanian. Hal ini berarti bahwa pola-pola hubungan ekonomi dalam masyarakat ini didominasi oleh interaksi dan ketergantungan antara pemilik tanah (tuan tanah) dan orang-orang yang bekerja di tanah tersebut, baik sebagai petani atau penyewa. Ini mencerminkan struktur ekonomi yang kuat dalam sektor pertanian.

Sebagian masyarakat melihat sistem feodalisme sebagai bentuk kehidupan yang dipenuhi dengan ketidakadilan, terutama dalam hal distribusi aset kepemilikan dan hasil pertanian (Mulyanto, 2018). Di Perancis, ketidakadilan semakin diperparah oleh kebijakan otoriter yang diterapkan oleh pemerintah kerajaan. Karena alasan ini, revolusi industri diharapkan akan membawa perubahan dari gaya hidup tradisional ke gaya hidup modern, menggantikan sistem pemerintahan sewenang-wenang dengan sistem yang lebih adil yang mengakui hak dan kewajiban setiap warga negara dengan cara yang sama. Ini disebut sebagai sistem pemerintahan

demokratis, yang seharusnya menciptakan masyarakat yang lebih adil, terbuka, setara, dan bebas.

Namun, realitas setelah terjadinya revolusi berbeda dari harapan. Sebaliknya, revolusi memicu kekhawatiran di kalangan banyak orang, terutama khawatir bahwa masyarakat akan jatuh ke dalam kekacauan anarkis. Kekhawatiran ini ternyata menjadi kenyataan dengan sosial yang benar-benar kacau akibat runtuhnya sistem pemerintahan di Perancis.

Sementara itu, meskipun revolusi industri diharapkan akan membawa kemajuan dan mengatasi ketidakadilan yang terjadi akibat sistem tradisional yang bersifat feodalistik, kenyataannya justru memperburuk ketidakadilan sosial. Revolusi tersebut tidak hanya mengubah struktur kelas masyarakat, tetapi juga memperdalam perpecahan antara kelas-kelas tersebut. Ini terlihat dari peningkatan tingkat kemiskinan, upah buruh yang masih jauh dari cukup, dan akumulasi kekayaan yang semakin besar di tangan pemilik modal. Dampak dari sistem sosial ini adalah meningkatnya konflik sosial, yang jika tidak ditangani dengan baik, bisa memunculkan revolusi kedua yang lebih berbahaya (Hardiman, 2003)

Sejalan dengan permasalahan ini, para pemikir mulai mencari jawaban, terutama dalam hal mengapa masyarakat mengalami perubahan ke arah pola-pola sosial yang ada. Mereka mencari pemahaman tentang apa yang ada di balik pola-pola kehidupan sosial tersebut, bagaimana menemukan solusi untuk mengatasi masalah ini, dan cara mencapai kehidupan yang lebih baik ketika muncul perubahan sosial. Salah satu pemikir yang secara ilmiah mengambil langkah pertama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah Auguste Comte, yang pertama kali memberikan nama kepada disiplin ilmu yang mempelajari hubungan sosial dan masyarakat ini, yang kita kenal sebagai sosiologi.

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, kita akan menguraikan beberapa poin penting dalam sejarah pemikiran sosiologi:

### **1.2.1.1. August Comtee (1798-1857)**

August Comtee, seorang filsuf dari Prancis, pertama kali memberikan nama "sosiologi" kepada ilmu yang mempelajari interaksi sosial dalam masyarakat, dan inilah sebabnya ia sering disebut sebagai Bapak Sosiologi. Selama karirnya, Comtee menulis beberapa buku yang menggambarkan pendekatan umum untuk memahami masyarakat. Dia juga menekankan bahwa ilmu sosiologi harus bergantung pada pengamatan, perbandingan, eksperimen, dan metode historis untuk menjadi bermanfaat. Comtee berpendapat bahwa sosiologi harus didasarkan pada fakta objektif, bukan harapan, prediksi, atau opini. Dengan pendekatan ini, sosiologi dapat memberikan pemahaman yang objektif tentang masyarakat berdasarkan kenyataan (Ritzer, 2014a).

Kontribusi pemikirannya yang signifikan terhadap perkembangan sosiologi dikenal sebagai hukum kemajuan manusia atau hukum tiga tahap. Comtee menjelaskan bahwa dalam menghadapi gejala alam dan sosial, manusia akan mengalami tiga tahap perkembangan yang melibatkan:

1. Fase Teologi merujuk pada penjelasan segala hal dengan mengacu pada prinsip-prinsip ilahiah atau kodrat yang bersifat ilahiah
2. Fase Metafisika menggambarkan tahap di mana manusia memahami sesuatu dengan merujuk pada kekuatan-kekuatan metafisik atau konsep-konsep yang melebihi batasan akal pikirannya, sering kali berhubungan dengan hal-hal yang bersifat abstrak.
3. Fase Positif adalah tahap di mana gejala alam dan gejala sosial dijelaskan dengan pendekatan ilmiah yang bersifat deskriptif, mengacu pada penelitian dan metode ilmiah.

Comte mengklaim bahwa sosiologi berada di puncak hierarki ilmu-ilmu sosial. Hal ini disebabkan oleh sosiologi memiliki cakupan yang lebih luas dan mendasar dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sosiologi berusaha untuk memahami masyarakat secara keseluruhan, termasuk struktur, fungsi, dan perubahan sosial. Dalam pandangan Comte, ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti ekonomi, antropologi, atau psikologi, lebih spesifik dan bergantung pada konsep-konsep yang dikembangkan oleh sosiologi (Lubis, 2014)

Comte membagi sosiologi menjadi dua kelompok besar untuk lebih memahami fungsinya dalam masyarakat. *Pertama*, Statistika Sosial. Statistika Sosial mencakup studi tentang stabilitas dan keteguhan dalam masyarakat. Statistika sosial berusaha untuk mengidentifikasi pola-pola tetap dalam masyarakat, seperti struktur sosial, hukum, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu kelompok atau masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah analisis tentang bagaimana masyarakat berfungsi dalam keadaan yang relatif stabil.

*Kedua*, Dinamika Sosial. Dinamika sosial, di sisi lain, menyoroti perubahan dalam masyarakat. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana masyarakat berubah seiring waktu, beradaptasi dengan perubahan sosial, dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi individu dan kelompok dalam masyarakat. Dinamika sosial dapat memeriksa faktor-faktor seperti revolusi, modernisasi, urbanisasi, dan faktor-faktor perubahan lainnya.

Comte menekankan bahwa sosiologi harus didasarkan pada fakta-fakta objektif. Hal ini berarti bahwa analisis sosiologi harus bergantung pada pengamatan yang akurat dan bukti empiris yang dapat diverifikasi. Ini bertentangan dengan pandangan yang bersifat spekulatif atau didasarkan pada opini subjektif. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian sosiologi berlandaskan pada metode ilmiah yang

obyektif, yang membantu dalam menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masyarakat.

Dalam esensi, pemikiran Comte tentang sosiologi telah memberikan fondasi penting bagi pengembangan ilmu sosial modern. Konsep-konsep seperti statistika sosial dan dinamika sosial, bersama dengan penekanan pada objektivitas, tetap relevan dalam studi sosiologi saat ini. Ini membantu para sosiolog untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek masyarakat dengan lebih baik, baik dalam kondisi stabil maupun dalam konteks perubahan yang terus-menerus.

### **1.2.1.2. Karl Marx (1818-1883)**

Pemikiran Karl Marx adalah salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah teori sosiologi. Marx, yang hidup pada abad ke-19, adalah seorang filsuf, ekonom, dan sosiolog Jerman yang menciptakan kerangka pemikiran yang menjadi dasar dari apa yang sekarang kita kenal sebagai teori konflik dalam sosiologi. Pemikiran Marx telah memberikan pandangan yang mendalam tentang struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat kapitalis (Magnis-Suseno, 1999)

Marx mengidentifikasi eksploitasi sebagai salah satu masalah sentral dalam sistem kapitalisme. Baginya, kapitalisme memiliki struktur yang memungkinkan pemilik modal (borjuis) untuk mengambil keuntungan yang besar dari pekerja (proletar) dengan cara mengendalikan jam kerja dan membayar upah yang rendah. Pekerjaan yang dilakukan oleh proletar seringkali menghasilkan nilai ekonomi yang jauh lebih besar daripada upah yang mereka terima. Ini dilihat oleh Marx sebagai bentuk eksploitasi, di mana borjuis mengambil sebagian besar nilai ekonomi yang dihasilkan oleh pekerja tanpa memberikan kompensasi yang setimpal.

Marx memprediksi bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan eksploitasi dalam kapitalisme akan memicu revolusi sosial. Pada awalnya, proletar (kelas pekerja) akan terus menerus

menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk, seperti upah rendah dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Ini akan memunculkan perasaan ketidakpuasan dan kesenjangan antara borjuis (kelas pemilik modal) yang semakin kaya dan proletar yang semakin miskin. Seiring perburukan kondisi proletar, mereka akan mulai menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan bersama sebagai kelas pekerja. Mereka akan menyadari bahwa borjuis, sebagai pemilik modal, menjadi pemain utama dalam eksploitasi mereka. Kesadaran kelas ini akan mempersatukan proletar dalam perjuangan bersama untuk mengubah sistem kapitalisme (Lubis, 2014)

Marx menganggap bahwa ketegangan antara borjuis dan proletar akan mencapai titik puncaknya, dan proletar akan bangkit untuk menggulingkan borjuis. Revolusi sosial akan muncul sebagai hasil dari daya tahan hidup proletar yang sudah mencapai titik kritis.

Sasaran utama revolusi sosial menurut Marx adalah menggulingkan borjuis atau kapitalis dari kekuasaan. Dalam pandangannya, borjuis adalah pihak yang memegang kendali ekonomi dan politik dalam masyarakat kapitalis. Revolusi ini akan mengakhiri sistem kapitalisme dan menggantinya dengan sistem sosialis.

Setelah revolusi, Marx mengharapkan terbentuknya masyarakat sosialis. Dalam masyarakat ini, kepemilikan sumber daya ekonomi akan menjadi milik bersama, dan distribusi kekayaan akan lebih adil. Tidak ada lagi perbedaan yang signifikan antara kelas-kelas sosial. Sosialisme adalah langkah perantara menuju masyarakat yang lebih maju yang dikenal sebagai komunisme, di mana negara sudah tidak lagi diperlukan dan kebutuhan individu dipenuhi berdasarkan kontribusi dan kebutuhan mereka.

### **1.2.1.3. Herbert Spencer (1820-1903)**

Herbert Spencer, seorang intelektual berkebangsaan Inggris, dikenal karena menyusun dengan teliti dan sistematis berbagai aspek materi sosiologi. Dalam perspektifnya, ia mengklasifikasikan objek kajian sosiologi yang sangat luas, termasuk di dalamnya kehidupan keluarga, perilaku politik, interaksi antara penganut agama, kontrol sosial, dan kehidupan dalam masyarakat industri yang rumit. Konsep-konsep yang relevan dengan bidang ini mencakup asosiasi sosial, dinamika komunitas lokal, pembagian tugas kerja, lapisan sosial, pengetahuan sosiologis, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pada tahun 1876, Spencer memperkenalkan teorinya yang terkenal dengan sebutan teori evolusi sosial. Teori ini telah menjadi dasar penting dalam perkembangan ilmu sosiologi hingga saat ini. Dalam konteks teori evolusi sosialnya, Spencer membandingkan perkembangan masyarakat dengan teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin dalam biologi. Dia menyampaikan pandangan bahwa perkembangan masyarakat manusia mengikuti pola evolusi linier yang mirip dengan perkembangan organisme hidup dari bentuk primitif menuju bentuk yang lebih kompleks, seperti yang diilustrasikan dalam teori evolusi Darwin. Artinya, Spencer melihat masyarakat akan mengalami perkembangan bertahap dari peradaban yang primitif ke peradaban modern, khususnya peradaban industri (Ritzer, 2014a).

Teori evolusi sosial Spencer memegang pandangan bahwa perubahan sosial dan peradaban manusia adalah hasil dari proses evolusi yang berkelanjutan. Dalam pemikirannya, perubahan-perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba atau acak, melainkan melalui serangkaian tahapan yang berurutan. Pandangan ini memiliki dampak penting dalam pemahaman kita tentang perkembangan sosial dan budaya sepanjang sejarah manusia.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun teori evolusi sosial Spencer memainkan peran penting dalam sejarah sosiologi, konsepnya juga telah dikritik karena sifatnya yang deterministik dan terlalu sederhana dalam menggambarkan perubahan sosial yang sebenarnya lebih kompleks. Meskipun demikian, warisan pemikiran Spencer tetap menjadi topik diskusi yang penting dalam sosiologi dan ilmu sosial pada umumnya.

#### **1.2.1.4. Emile Durkheim (1858-1917)**

Durkheim merupakan seorang sosiolog Prancis, mengembangkan berbagai konsep dan teori yang membantu memahami dinamika sosial dan perkembangan masyarakat. Salah satu konsep inti dalam pemikiran Durkheim adalah konsep solidaritas sosial. Ia mengklasifikasikan dua bentuk utama solidaritas: solidaritas mekanis dan organik. Solidaritas mekanis merujuk pada situasi di mana masyarakat bersatu karena kesamaan nilai, norma, dan identitas. Di sisi lain, solidaritas organik terjadi dalam masyarakat yang lebih kompleks, di mana orang-orang saling tergantung satu sama lain karena spesialisasi dalam peran dan pekerjaan mereka. Konsep ini membantu memahami bagaimana masyarakat bisa tetap bersatu dalam keberagaman (Ritzer, 2014a).

Durkheim meyakini bahwa setiap aspek dari masyarakat memiliki fungsi sosial tertentu. Ia mengembangkan pemahaman tentang bagaimana institusi sosial, seperti agama dan pendidikan, berperan dalam memelihara kohesi sosial dan mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Fungsi-fungsi ini membantu menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial.

Durkheim juga mempelajari deviasi sosial, yaitu perilaku yang melanggar norma-norma sosial. Ia berpendapat bahwa deviasi adalah bagian alami dari masyarakat dan dapat memiliki dampak positif karena dapat memicu perubahan sosial. Dia juga membahas peran kontrol sosial dalam menjaga

ketertiban dan mengendalikan deviasi. Pengertian ini membantu dalam memahami dinamika pelanggaran norma sosial dan bagaimana masyarakat meresponsnya.

Dalam penjelasannya, Durkheim dikenal dengan penggunaan metode statistik dalam penelitiannya. Ia mengembangkan analisis statistik untuk memahami hubungan antara variabel sosial, seperti tingkat bunuh diri dengan faktor-faktor sosial seperti isolasi sosial. Pendekatan ini memberikan dasar untuk penelitian empiris dalam sosiologi dan penggunaan data untuk menjelaskan fenomena sosial. Durkheim sangat peduli tentang integrasi sosial, yaitu sejauh mana individu merasa terhubung dan terlibat dalam masyarakat. Ia merasa bahwa rendahnya integrasi sosial dapat menyebabkan ketidakstabilan dan masalah sosial. Studi-studinya tentang bunuh diri dan anomie (ketidaknyamanan sosial yang muncul saat norma-norma sosial lemah) adalah contoh bagaimana ia menyelidiki isu-isu integrasi sosial.

Pemikiran Emile Durkheim telah berpengaruh dalam pengembangan ilmu sosiologi dan memainkan peran penting dalam pemahaman kita tentang struktur sosial, norma, dan dinamika masyarakat. Ia mendorong pendekatan ilmiah dalam sosiologi dan mempromosikan penelitian empiris sebagai cara untuk memahami perubahan sosial dan perilaku manusia dalam konteks sosialnya (Soekanto, 2010).

Emile Durkheim adalah seorang sosiolog yang produktif dan terkenal dengan karyanya dalam bidang sosiologi. Berikut beberapa karya pentingnya :

**The Division of Labor in Society**, Ini adalah salah satu karya utama Durkheim yang diterbitkan pada tahun 1893. Dalam buku ini, ia membahas perbedaan antara masyarakat yang bersifat mekanis (dengan solidaritas mekanis) dan masyarakat yang bersifat organik (dengan solidaritas organik) serta implikasinya terhadap pembagian kerja dan integrasi sosial.

**Suicide: A Study in Sociology:** Karya ini diterbitkan pada tahun 1897 dan dianggap sebagai salah satu penelitian pionir dalam sosiologi empiris. Durkheim menyelidiki statistik bunuh diri di Prancis dan mengembangkan teori tentang faktor-faktor sosial yang memengaruhi tingkat bunuh diri, termasuk tingkat integrasi sosial.

**The Rules of Sociological Method,** Diterbitkan pada tahun 1895, buku ini menguraikan metode dan pendekatan sosiologis yang harus digunakan dalam penelitian ilmiah. Durkheim memperkenalkan konsep "fakta sosial" yang merujuk pada aspek-aspek objektif dalam masyarakat yang dapat diukur dan dipelajari secara ilmiah.

**Professional Ethics and Civic Morals,** Durkheim menulis esai ini pada tahun 1957 untuk merespon kritik terhadap pandangan etika profesionalnya. Dalam esai ini, ia membahas pentingnya etika dalam masyarakat modern dan bagaimana profesi dan moralitas dapat saling mendukung.

### **1.2.1.5. Max Weber (1864-1920)**

Pemikiran Max Weber adalah salah satu kontribusi paling berpengaruh dalam sejarah sosiologi dan ilmu sosial. Weber, seorang intelektual Jerman pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, mengembangkan berbagai konsep dan teori yang membantu kita memahami dinamika masyarakat, agama, birokrasi, dan tindakan sosial manusia.

Salah satu konsep sentral dalam pemikiran Weber adalah teori tindakan sosial. Weber mengklasifikasikan tindakan sosial menjadi empat tipe utama: tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan nilai-orientasi, dan tindakan rasional-terarah. Ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami perilaku individu dalam masyarakat. Weber sangat tertarik pada pemahaman tentang apa yang mendorong individu dalam berperilaku.

Weber juga mengembangkan pemikiran tentang birokrasi. Ia menggambarkan birokrasi sebagai bentuk organisasi yang sangat rasional dan efisien. Namun, ia juga mencatat ironi beseragamasi dalam birokrasi di mana aturan yang ketat dan hierarki dapat menghambat kreativitas dan inovasi. Konsep birokrasi Weber telah menjadi bahan studi penting dalam ilmu administrasi publik dan organisasi.

Dalam bidang agama, Weber menghasilkan karya terkenalnya, "*The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*" (Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme). Dalam buku ini, ia mengaitkan perkembangan kapitalisme modern dengan etika Protestan, terutama Calvinisme. Weber berpendapat bahwa nilai-nilai agama Calvinisme, seperti kerja keras dan akumulasi modal, memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi kapitalisme (Weber, 2006).

Weber juga mengembangkan teori tentang kelas sosial yang kompleks, yang mempertimbangkan faktor seperti kelas ekonomi, kelas sosial, dan status sosial. Kontribusinya dalam pemahaman tentang perbedaan kelas sosial menjadi dasar bagi banyak studi kelas sosial dan stratifikasi dalam sosiologi.

Pendekatan Weber terhadap penelitian sosial juga menekankan pemahaman makna yang diberikan individu kepada tindakan mereka. Konsep "*Verstehen*" (pemahaman) menekankan pentingnya memahami motivasi individu dalam konteks sosial. Selain itu, Weber menggunakan "ideal tipe" atau konsep analitis abstrak untuk memahami fenomena sosial yang kompleks.

Pemikiran Max Weber telah memberikan sumbangan penting bagi pemahaman kita tentang masyarakat, agama, birokrasi, dan tindakan sosial. Konsep-konsepnya masih menjadi dasar bagi banyak penelitian di bidang sosiologi dan ilmu sosial lainnya, dan relevansinya masih terasa dalam analisis masyarakat modern (Lubis, 2014).

## 1.2.2. Sosiologi Modern

Perkembangan Sosiologi Modern merupakan evolusi yang signifikan dalam bidang sosiologi, dan untuk memahaminya lebih dalam, kita perlu melihat pergeseran yang terjadi dalam pendekatan dan fokus penelitian dalam sejarah sosiologi. Pada perkembangannya sosiologi sebagai ilmu muncul di Eropa pada abad ke-19, dengan pemikiran-pemikiran tokoh seperti Auguste Comte dan Emile Durkheim. Fokus utama sosiologi pada awalnya adalah memahami struktur sosial dan berbagai hukum sosial yang mengatur masyarakat.

Pada abad ke-20, terutama di Amerika Serikat dan Kanada, sosiologi mengalami perkembangan yang mencolok. Hal ini terkait dengan perubahan besar dalam struktur sosial dan kondisi masyarakat di wilayah tersebut. Imigrasi besar-besaran, pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan urbanisasi yang cepat mengubah lanskap sosial. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan munculnya kota-kota industri baru membawa dampak sosial yang signifikan. Penyempitan struktur sosial, kepadatan penduduk, dan masalah-masalah perkotaan, seperti kriminalitas dan kerusuhan, menjadi perhatian utama. Situasi ini memicu minat para sosiolog untuk memahami, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap gejala-gejala sosial yang muncul. Mereka menyadari bahwa pendekatan sosiologi yang dominan di Eropa, yang lebih bersifat teoritis, tidak lagi cukup memadai untuk mengatasi tantangan sosial yang baru. Oleh karena itu, sosiologi modern mulai mengalami pergeseran fokus. Ia menjadi lebih mikro dan empiris dalam pendekatannya. Penelitian dilakukan dengan lebih berorientasi pada data, observasi, dan analisis konkrit tentang masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat (Ritzer, 2014b).

Konsep "Verstehen" atau pemahaman, yang ditekankan oleh Max Weber, menjadi landasan penting dalam sosiologi modern. Ini berarti para peneliti berusaha memahami makna yang diberikan oleh individu terhadap tindakan mereka, bukan

hanya melihatnya sebagai objek studi. Pendekatan modern dalam sosiologi memungkinkan para peneliti untuk mendekati permasalahan sosial dengan lebih terperinci. Mereka mulai mengidentifikasi fakta-fakta sosial yang muncul, seperti perilaku sosial, struktur kelompok, dan pola-pola interaksi dalam masyarakat.

Hasil dari identifikasi fakta-fakta sosial ini digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan teori-teori yang lebih relevan dalam menjelaskan perubahan sosial dan perilaku manusia. Ini mengarah pada pengembangan berbagai aliran sosiologi yang lebih spesifik, seperti sosiologi keluarga, sosiologi kriminologi, dan sebagainya.

Dalam perkembangannya, sosiologi modern juga semakin mengakomodasi pendekatan lintas disiplin, yang mengintegrasikan konsep dan teori dari berbagai bidang ilmu sosial, seperti psikologi, antropologi, dan ekonomi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah-masalah sosial. Perkembangan Sosiologi Modern mencerminkan evolusi dalam cara kita memahami dan mendekati kompleksitas masyarakat modern. Pendekatan empiris, analitis, dan interdisipliner menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semakin kompleks dalam sosiologi dan memahami bagaimana masyarakat berubah seiring waktu (Lubis, 2015).

## Daftar Pustaka

- Hardiman, F. B. (2003). *Pustaka Filsafat Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Kanisius.
- Lubis, A. Y. (2014). *Filsafat ilmu: Klasik hingga kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, A. Y. (2015). *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial Hingga Multikulturalisme*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Magnis-Suseno, F. (1999). *Pemikiran Karl Marx: dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyanto, D. (2018). *Geneologi kapitalisme: antropologi dan ekonomi politik pranata eksploitasi kapitalistik*. Resist Book.
- Ritzer, G. (2014a). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Pustaka Pelajar.
- Ritzer, G. (2014b). *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Setiadi, E. M. (2011). *Pengantar Sosiologi: pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: teori, aplikasi, dan pemecahannya*.
- Siahaan, H. M. (1986). *Pengantar ke arah sejarah dan teori sosiologi*.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Weber, M. (2006). *Etika protestan dan spirit kapitalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



# BAB 2

## “BIDANG KAJIAN SOSIOLOGI”

---



**Soetji Andari**

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

soet001@brin.go.id

### 2.1. Pendahuluan: Kajian Sosiologi

**I**lmu sosial yang mempelajari setiap kehidupan masyarakat yang dipelajari adalah bagian dari sosiologi. Objek kajian dari sosiologi tidak lain adalah kehidupan manusia. Sosiologi mempelajari masyarakat, interaksi sosial, pola perilaku, dinamika kelompok manusia dan struktur sosial (Puspita & Mahmudah, 2022). Fokus sosiologi pada pemahaman bagaimana individu berinteraksi dengan kelompoknya, dengan membentuk nilai dan norma sosial, serta struktur sosial dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat. Struktur masyarakat mengacu pada pengaturan

komponen dalam kelompok masyarakat dan organisasi mengatur komponen sosial dalam suatu kelompok manusia. Struktur masyarakat mencakup bagaimana individu dan kelompoknya untuk saling berkomunikasi, berinteraksi, serta melakukan peran dalam konteks sosial, politik dan ekonomi(Darakay & Murwani, 2021a).

Pada periode tertentu struktur masyarakat dapat bervariasi antara negara budaya, pada periode waktu tertentu. Beberapa komponen utama dalam struktur masyarakat antara lain struktur masyarakat yang terbagi menjadi kelas sosial berdasarkan faktor ekonomi, pekerjaan, dan Pendidikan. Kelas sosial dapat memainkan kelas atas, menengah dan bawah yang menentukan dalam mengakses sumber daya dan kesempatan Kelompok-kelompok sosial, seperti keluarga, agama, pendidikan, dan organisasi-organisasi masyarakat, membentuk jaringan yang memberikan struktur dan tujuan dalam kehidupan masyarakat. Institusi-institusi ini membantu mengarahkan perilaku dan mengatur interaksi sosial(Cahyono & Ganefo, 2021). Sosiologi menjelaskan dan menganalisis berbagai aspek kehidupan sosial termasuk yang tanpa terbatas seperti perubahan sosial, stratifikasi sosial, konflik sosial, kelompok sosial, institusi sosial seperti pemerintahan keluarga, agama dan Pendidikan yang berdampak pada teknologi dan globalisasi masyarakat(Zahid, 2019).

Kompleksitas kehidupan manusia dalam konteks sosial dan mengembangkan teori dan konsep merupakan tujuan sosiologi, selain itu untuk lebih memahami menganalisis masyarakat serta proses yang terjadi di dalamnya. Penggunaan metodologi penelitian dalam sosiologi dengan metode penelitian ilmiah untuk mengumpulkan data empiris yang mendukung teori dan hipotesis mengenai fenomena sosial. Sosiologi berusaha untuk lebih memahami mengapa masyarakat berperilaku dan berfungsi memahami interaksi, struktur sosial, dan dinamika sosial.

Dalam konteks penelitian sosiologis kontemporer, kita dapat melihat praktik dan arah penelitian sebagai cerminan dari standar dan prioritas saat ini dalam desain penelitian. Meskipun desain penelitian dan teknik pengumpulan data telah berubah dari waktu ke waktu, metode saat ini dan masa depan masih dipengaruhi oleh dan terkait dengan teknik masa lalu. Hughes (2012) menyoroti volatilitas nilai yang terkait dengan sosiologi visual selama seratus tahun terakhir. Pada awalnya, metode penelitian kualitatif dianggap standar untuk pengumpulan data (Goodwin, 2023). Tantangan bagi sosiolog adalah mempertimbangkan fenomena lain serta memikirkan kembali kategori-kategori dan konsep-konsep inti dengan mempertimbangkan formasi alternatif yang dipahami sebagai gerakan sosial (Bhambra & Santos, 2017).

Sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji hubungan masyarakat dengan tingkah laku manusia. Objek kajian sosiologi tentang perilaku serta kehidupan manusia, proses dan interaksi sosial. Sosiologi mempelajari kehidupan sosial, perubahan sosial, interaksi sosial, dan sebab dan akibat sosial dari perilaku manusia. Manusia adalah makhluk sosial, bergantung pada lingkungan dan satu sama lain, hal ini menyebabkan sosiologi sangat penting dalam kehidupan manusia. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari timbal balik dan semua hukum struktur sosial, lembaga sosial, dan kelompok sosial yang ada dalam kehidupan manusia. Sosiologi adalah ilmu sosial murni, bukan ilmu terapan. Sosiologi mempelajari semua aspek pada semua lapisan masyarakat, baik mikro maupun makro. Kajian sosiologi mempelajari hubungan timbal balik antara orang dengan orang lain. Hubungan antara individu dan kelompok. Hubungan kelompok dengan kelompok lain yang memiliki karakteristik kelompok sosial yang berbeda (Zia et al., 2020).

## 2.2. Kajian Sosiologi Di Era Masyarakat 5.0

Sosiologi saat ini menjadi topik minat khusus dengan konsep di masa depan. Hal tersebut dapat dilihat pada penelitian dan debat di berbagai forum, seperti konferensi internasional dan jurnal sosiologi. Teori sosial postmodern saat ini cenderung berada dalam kondisi ketegangan antara mereka yang menyatakan bahwa teori-teori sosial postmodern masih merupakan bagian dari zaman modern dan mereka yang berpendapat bahwa teori-teori sosial postmodern sama sekali terpisah dari era modern. Fokus ini disebabkan oleh serangkaian krisis ekonomi, kesehatan, geopolitik, dan lingkungan yang mempengaruhi masyarakat(Hidayat, 2019).

Di Era Masyarakat 5.0, sosiologi memiliki posisi yang signifikan untuk menguasai dan membantu warga negara dalam menghadapi tantangan dan menggunakan peluang yang timbul dari integrasi teknologi yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Kajian Sosiologi di Era Citizen 5.0 adalah sebuah konsep yang berasal dari Jepang yang mengacu pada masyarakat berikutnya setelah Citizen 4.0 atau yang lebih dikenal dengan Revolusi Industri ke-4). Jika Citizen 4.0 berfokus pada digitalisasi dan otomatisasi melalui teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan robotika, masyarakat 5.0 berusaha untuk mengintegrasikan teknologi-teknologi tersebut dengan kehidupan manusia untuk menghasilkan masyarakat yang lebih berpusat pada manusia, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi berbagai masalah sosial.

Kajian sosiologi pada masa Citizen 5.0 mencakup berbagai topik, termasuk integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari, terutama AI, untuk meningkatkan kualitas hidup, termasuk sistem pembelajaran harus beradaptasi untuk mempersiapkan masyarakat yang terus bergantung pada teknologi. Teknologi dapat mempengaruhi hubungan antar manusia melalui ikatan di dunia digital. Tantangan etika

menimbulkan integrasi yang mendalam antara hak dan manusia. Implikasi dari masyarakat yang menjadi tergantung pada masalah kesehatan dan kesejahteraan.

Banyak kekhawatiran pada era ini tentang dampak teknologi digital di masa depan, termasuk kecerdasan buatan untuk memecahkan masalah kognitif. Perkembangan teknologi informasi berdampak pada beberapa aspek kehidupan, berupa perubahan pola interaksi sosial yang menjadi inti di era sosial 5.0. Tantangan bagi masyarakat yang dihadapi, tidak hanya bagaimana beradaptasi dengan teknologi dan perubahan yang serba berbasis teknologi pada saat ini. Namun interaksi dengan pihak lain untuk mengikuti cara lain. Masyarakat pada umumnya mempunyai cara hidup baru yang tidak bisa lepas sepenuhnya dari perangkat elektronik. Kebutuhan manusia dan teknologi tidak lepas dari alat yang dapat memenuhi sebagian besar alat untuk dapat terpenuhi kebutuhan di masa mendatang. Manusia untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan tugas dengan menggunakan teknologi dan peran penting teknologi yang membawa peradaban manusia memasuki era digital.

Pada Era digital telah membawa banyak perubahan positif yang dapat dimanfaatkan dengan baik (Setiawan, 2017). Tantangan dan kompleksitas ini bukanlah yang pertama, tetapi konteks saat ini menawarkan cara baru untuk memahami konsep tersebut. Teknologi informasi membawa perubahan dan perkembangan di masyarakat. Dari sinilah revolusi sosial lahir dan menyebabkan perilaku masyarakat mengalami perubahan budaya, normatif, dan etika. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan budaya suku, ras, dan agama yang beragam memiliki potensi perubahan sosial yang besar. Dengan latar belakang dan usia yang beragam, hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai sarana mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi (Bimantoro et al., 2021).

Masyarakat elit memiliki visi masa depan yang berbeda dengan kehidupan sehari-hari, seperti tersebut diilustrasikan melalui perbandingan antara investasi Elon Musk dalam proyek masa depan di Mars dan keluarga biasa yang harus dihadapkan pada keputusan tentang pemanas atau makanan. Pertanyaan tentang arah masa depan semakin mendominasi debat publik, yang melibatkan warga negara, pemerintah, dan komunitas bisnis. Wawasan sosiologis sering kurang dimanfaatkan dalam ilmu keberlanjutan. Untuk lebih memperkuat komitmennya yang digerakkan oleh masalah dan berorientasi pada solusi, ilmu keberlanjutan dapat menggabungkan konsepsi sosiologis fundamental dengan lebih baik ke dalam intinya. berbasis hasil dan pembahasan etika masyarakat di era revolusi industri 5.0 memerlukan edukasi yang memadai. Hal ini agar masyarakat tetap menjaga akhlak meski di dunia maya. Tidak hanya masyarakat saja, seluruh lapisan masyarakat memerlukan etika teknologi informasi yang baik agar ada keseimbangan antara dunia nyata dan dunia maya. Kemajuan teknologi dan perubahan di era digital harus benar-benar diperhitungkan. Pada era Revolusi Industri 4.0 masih berbasis komunitas sehingga memerlukan kesiapan masyarakat dalam menyambut era 5.0(Rafiq, 2020).

Pada era revolusi industri 5.0 merupakan era masyarakat dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang akan mentransformasikan data yang dikumpulkan melalui Internet di semua lapisan masyarakat menjadi kecerdasan baru untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan membuka peluang bagi masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi, dimana keberadaan peran manusia tergantikan oleh kecerdasan buatan berupa robot-robot cerdas, akan mempengaruhi kehidupan manusia dan menjadi perhatian kedua belah pihak karena akan menimbulkan situasi tenaga kerja yang semakin habis(Astuti & Muflikhah, 2019).

### 2.3. Aspek-Aspek Studi Sosiologis

Ilmu keberlanjutan jarang menggunakan informasi sosiologis. Ilmu keberlanjutan mungkin dapat lebih baik mengintegrasikan wawasan sosiologi dasar ke dalam fondasinya. Pemikiran sosiologis memprioritaskan empat aspek, dan hal ini akan memungkinkan penelitian interdisipliner yang berfokus pada masalah dan solusi (Longo et al., 2021). Pertama, konstruksi sosial dan realisme kritis, kedua struktur dan agensi, ketiga kekhususan historis, dan keempat aksi kolektif adalah empat komponen pemikiran sosiologis yang dianggap penting untuk kemajuan penelitian ilmu keberlanjutan. Sosiologi untuk mendukung pemahaman yang terus berubah tentang bagaimana dunia bio-geo-fisik berinteraksi dengan masyarakat. Kami berpendapat bahwa integrasi yang diperlukan dari perspektif sosiologis ini sangat penting untuk menghasilkan penilaian menyeluruh tentang penyebab dan konsekuensi dari perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Hal ini dikarenakan bidang ilmu keberlanjutan sering mengabaikan atau menyederhanakan perspektif ini. Selain itu, perspektif ini memiliki kemampuan untuk mendorong pengembangan dan implementasi solusi yang efektif untuk tantangan keberlanjutan.

Kita dapat melihat bahwa praktik dan pedoman penelitian dalam penelitian sosiologi modern mencerminkan keterampilan dan kebutuhan penelitian saat ini. Metodologi kontemporer masih dipengaruhi oleh dan terkait dengan metode-metode sebelumnya, meskipun desain penelitian dan metode pengumpulan data telah berubah dari waktu ke waktu. Hughes (2012) menunjukkan ketidakpastian nilai dalam sosiologi visual yang sudah ada sejak seratus tahun yang lalu. Pada awalnya, teknik ini dianggap sebagai metode yang umum untuk pengumpulan data (Goodwin, 2023). Sosiologi menghadapi tantangan ketika memikirkan fenomena baru ini. Hal ini membuat mereka harus memikirkan kembali kategori

dan ide dasar mereka dengan mempertimbangkan bentuk-bentuk alternatif yang telah dipahami dari gerakan sosial global yang menghasilkannya (Bhambra & Santos, 2017). Sosiologi adalah bidang yang mempelajari bagaimana masyarakat dan perilaku manusia berhubungan satu sama lain.

Kehidupan manusia, proses interaksi sosial, dan hasil dari interaksi sosial adalah subjek dari studi sosiologi. Sosiologi mempelajari kehidupan sosial, perubahan, interaksi, serta sebab dan akibat dari perilaku manusia. Perilaku manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain dan lingkungannya. Oleh karena itu, sosiologi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan segala hukum yang berlaku dalam struktur sosial, lembaga-lembaga sosial, dan kelompok-kelompok sosial manusia.

Sosiologi adalah bidang yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan bukan bidang terapan. Sosiologi menyelidiki setiap aspek masyarakat, baik secara mikro maupun makro. Studi sosiologi mengkaji bagaimana hubungan antara individu dan lingkungannya. Hubungan yang terjalin antara individu dan kelompok. hubungan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda (Nursafitri et al., 2020). Saat ini, konsep "masa depan" telah menjadi subjek yang menarik perhatian khusus dalam sosiologi. Penelitian dan diskusi mengenai hal tersebut muncul di berbagai tempat, seperti jurnal sosiologi dan konferensi internasional. Menurut Hidayat (2019), ada banyak perbedaan pendapat tentang teori sosial postmodern saat ini. Ada yang berpendapat masih bagian dari era modern, ada pula yang berpendapat sama sekali berbeda dengan era modern. Fokus ini disebabkan oleh berbagai krisis yang melanda masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, geopolitik, dan lingkungan.

Pada era modern banyak kekhawatiran tentang dampak teknologi digital di masa depan, termasuk kecerdasan buatan.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak pada beberapa aspek kehidupan, khususnya aspek sosial, berupa perubahan pola interaksi sosial yang menjadi inti di era sosial 5.0 ini. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi masyarakat, tidak hanya bagaimana beradaptasi dengan perubahan yang serba berbasis teknologi saat ini, namun juga bagaimana berinteraksi dengan pihak lain yang mulai mengikuti cara lain. Tantangan dan kompleksitas ini bukanlah yang pertama, tetapi konteks saat ini menawarkan cara baru untuk memahami konsep tersebut. Teknologi informasi membawa perubahan dan perkembangan di masyarakat. Dari sinilah revolusi sosial lahir dan menyebabkan perilaku masyarakat mengalami perubahan budaya, normatif, dan etika. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan budaya suku, ras, dan agama yang beragam memiliki potensi perubahan sosial yang besar. Dengan latar belakang dan usia yang beragam, hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai sarana mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi (Bimantoro et al., 2021).

Elit teknis dengan visi masa depan sering terputus dari kehidupan sehari-hari, seperti yang diilustrasikan oleh perbandingan antara investasi Elon Musk dalam proyek masa depan di Mars dan keluarga biasa yang harus dihadapkan pada keputusan tentang pemanas atau makanan. Pertanyaan tentang arah masa depan semakin mendominasi debat publik, yang melibatkan warga negara, pemerintah, dan komunitas bisnis. Era Sosial 5.0 merupakan era masyarakat dengan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang akan mentransformasikan data yang dikumpulkan melalui Internet di semua lapisan masyarakat menjadi kecerdasan baru untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan membuka peluang bagi masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi, dimana keberadaan peran manusia tergantikan oleh kecerdasan buatan berupa robot-robot cerdas, akan mempengaruhi kehidupan manusia dan

menjadi perhatian kedua belah pihak karena akan menimbulkan situasi tenaga kerja yang semakin habis (Astuti & Muflikhah, 2019).

Pengetahuan sosiologis jarang digunakan dalam ilmu keberlanjutan. Untuk lebih memperkuat komitmennya terhadap penelitian interdisipliner yang berorientasi pada masalah dan solusi, ilmu keberlanjutan dapat lebih mengintegrasikan wawasan sosiologis dasar ke dalam intinya, pemikiran sosiologi menyoroti empat aspek. Wawasan sosiologis sering kurang dimanfaatkan dalam ilmu keberlanjutan. Untuk lebih memperkuat komitmennya yang digerakkan oleh masalah dan berorientasi pada solusi, ilmu keberlanjutan dapat menggabungkan konsepsi sosiologis fundamental dengan lebih baik ke dalam intinya. berbasis hasil dan pembahasan etika masyarakat di era society 5.0 memerlukan edukasi yang memadai. Hal ini agar masyarakat tetap menjaga akhlak meski di dunia maya. Tidak hanya masyarakat saja, seluruh lapisan masyarakat memerlukan etika IT yang baik agar ada keseimbangan antara dunia nyata dan dunia maya.

Kemajuan teknologi dan perubahan di era digital harus benar-benar diperhitungkan. Terlebih era Revolusi Industri 4.0 masih berbasis komunitas sehingga memerlukan kesiapan masyarakat dalam menyambut era 5.0 (Rafiq, 2020). Empat aspek pemikiran sosiologis yang dianggap penting untuk memajukan penelitian ilmu keberlanjutan: (1) konstruksi sosial dan realisme kritis, (2) struktur dan agensi, (3) kekhususan sejarah, dan (4) tindakan kolektif. Sosiologi untuk mendukung pemahaman yang dinamis tentang bagaimana hubungan sosial berinteraksi dengan dunia bio-geo-fisik. Integrasi yang diperlukan dari wawasan sosiologis ini, kami berpendapat, sangat penting untuk menghasilkan penilaian komprehensif tentang penyebab dan konsekuensi dari perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, dan cenderung diabaikan atau

terlalu disederhanakan dalam bidang ilmu keberlanjutan. Selain itu, hal ini dapat merangsang pengembangan dan penerapan solusi yang layak untuk tantangan keberlanjutan.

Konstruksi sosial merupakan konsep yang sangat penting dalam bidang sosiologi. Ini mengacu pada pemahaman bahwa realitas sosial tidak terbentuk secara alami atau obyektif, tetapi dibentuk oleh interaksi, persepsi, nilai, norma, bahasa, dan budaya masyarakat. Dengan kata lain, banyak aspek dunia sosial, seperti norma perilaku, identitas, jenis kelamin, ras, agama, dan bahkan konsep realitas, bukanlah hasil dari sifat-sifat yang melekat atau hukum alam, yang merupakan hasil dari proses sosial. Hasil ini menyoroti fleksibilitas hubungan antara nilai dan perilaku, serta peran konstruksi sosial dalam memandu sejauh mana motivasi oleh nilai mendorong perilaku tertentu yang diekspresikan dalam tindakan tertentu (Ponizovskiy et al., 2019). Pada dasarnya, konstruksi sosial menunjukkan bagaimana orang berkontribusi dalam penciptaan makna dalam masyarakatnya melalui interaksi sosial, budaya, dan bahasa. Pemahaman tentang struktur sosial membantu kita menyadari bahwa apa yang kita anggap sebagai "kebenaran" atau "kenyataan" sebenarnya dibentuk oleh konteks sosial yang kompleks.

Proses sosial penting untuk dipahami bahwa apa yang dianggap "benar" atau "benar" dalam masyarakat seringkali dipengaruhi oleh pandangan kolektif dan budaya kelompok masyarakat tertentu. Struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi sosial dan peran sosial, berbicara tentang solidaritas sosial dan keteraturan perilaku sosial dan hubungan sosial dalam masyarakat (Darakay & Murwani, 2021b). Konsep ini menekankan bahwa struktur sosial membentuk pandangan kita tentang dunia dan membentuk cara kita melihatnya. Contoh yang sering dikutip dalam konteks membangun masyarakat meliputi: gender, ras, norma sosial, agama dan realitas sosial.

Konsep gender bukanlah sesuatu yang baku atau universal. Pendapat tentang apa yang dimaksud dengan maskulinitas dan feminitas dapat sangat bervariasi antar budaya. Gagasan tentang ras dan rasisme juga mencerminkan konstruksi sosial. Pendapat tentang ras berubah dari waktu ke waktu dan bervariasi di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Standar masyarakat norma sosial mengenai perilaku, etika, dan moralitas juga merupakan konstruksi sosial. Apa yang dianggap baik atau buruk dapat sangat bervariasi tergantung pada nilai-nilai sosial. Keyakinan agama, mitos, dan praktik spiritual merupakan hasil konstruksi sosial dalam masyarakat. Realitas sosial yaitu cara kita memahami dan menafsirkan realitas juga dipengaruhi oleh struktur sosial. Misalnya, media massa dan persepsi kolektif dapat membentuk pandangan kita tentang peristiwa(Karwati, 2021).

Interaksi sosial mengacu pada proses komunikasi, kontak fisik atau pertukaran antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Interaksi sosial dalam sosiologi adalah suatu proses komunikasi, kontak atau pertukaran fisik yang terjadi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini melibatkan banyak bentuk interaksi yang berbeda, dari percakapan sehari-hari hingga bentuk yang lebih kompleks seperti kerja sama, konflik, dan kerja sama. Interaksi sosial berperan penting dalam pembentukan norma sosial, nilai, dan dinamika kelompok dalam masyarakat . Hal ini dapat melibatkan berbagai bentuk seperti percakapan, kerja sama, konflik, serta pengaruh sosial yang saling mempengaruhi. Keterlibatan sosial sangat terkait dengan kebahagiaan yang lebih tinggi saat ini dan rata-rata keseluruhan, baik yang diukur dengan laporan diri dan laporan pengamat(Dwi Eriyanti, 2017).

## **2.4. Relasional dan Interaksi Sosial**

Hubungan dan interaksi sosial merupakan konsep kunci dalam bidang sosiologi yang mempelajari bagaimana individu

dalam masyarakat saling berhubungan, berinteraksi, dan membentuk pola hubungan yang kompleks. Dalam sosiologi, hubungan mengacu pada hubungan yang terbentuk antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat sedangkan interaksi sosial mengacu pada proses komunikasi, pertukaran informasi, dan kegiatan bersama antara individu atau kelompok individu atau kelompok dalam masyarakat (Zia et al., 2020).

Hubungan sosial sering disebut-sebut penting untuk kesejahteraan. Namun, sebagian besar penelitian tentang hubungan sosial mengandalkan pengukuran laporan diri mengenai interaksi sosial dan kesejahteraan, sehingga sulit untuk memisahkan hubungan yang sebenarnya dari variasi metode yang digunakan bersama. Berikut adalah beberapa konsep yang berkaitan dengan hubungan dan interaksi sosial dalam konteks sosiologi. Kebutuhan setiap manusia pada yang paling hakiki adalah untuk berinteraksi sosial. Setiap manusia adalah makhluk sosial, sehingga setiap orang perlu berinteraksi dengan orang lain. Agar manusia ada. Dan seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan interaksi sosial semakin meningkat. Dan media untuk berinteraksi lebih banyak. Setiap orang mempunyai motivasinya masing-masing dalam berinteraksi sosial. Menurut sosiolog Herbert Blumer, ada tiga prinsip utama interaksi, yaitu makna, bahasa, dan berpikir (Xiao, 2018).

Hubungan sosial termasuk jenis hubungan yang dapat dibentuk antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Hubungan ini dapat bersifat formal atau informal dan dapat melibatkan berbagai aspek seperti kekerabatan, pekerjaan, teman, dll. Beberapa contoh hubungan sosial termasuk hubungan orang tua-anak, rekan kerja, teman sekelas, pasangan hidup, dan banyak lagi.

1. Interaksi sosial mengacu pada proses komunikasi dan pertukaran informasi antara individu atau kelompok. Interaksi ini dapat terjadi secara langsung atau melalui

sarana komunikasi seperti telepon, SMS atau jejaring sosial. Interaksi sosial mencakup semua bentuk komunikasi verbal dan nonverbal yang terjadi dalam konteks yang berbeda, seperti percakapan informal, diskusi kelompok, konflik, dan negosiasi.

2. Gaya komunikasi individu atau kelompok dapat mempengaruhi bagaimana hubungan dan interaksi sosial terbentuk. Gaya komunikasi yang efektif, terbuka, dan empati cenderung membangun hubungan yang positif, sedangkan gaya komunikasi yang otoriter atau tidak efektif dapat menghambat interaksi yang sehat.
3. Norma sosial adalah aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat sedangkan nilai sosial adalah kepercayaan yang dianggap penting oleh masyarakat. Norma dan nilai sosial memengaruhi cara individu berinteraksi dan membentuk hubungan sosial. Mereka membantu menetapkan ekspektasi dalam interaksi dan membentuk dasar untuk hubungan yang saling menguntungkan.

Bidang studi sosiologi adalah mempelajari masyarakat melalui pola perilaku orang dalam masyarakat, analisis struktur sosial, interaksi sosial, perkembangan budaya, stratifikasi sosial dan perubahan sosial dalam masyarakat, konteks dan skala yang berbeda. Bidang penelitian sosiologi sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dalam masyarakat. Tatahan sosial dalam sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan atau pola hubungan sosial antara individu, kelompok atau lembaga dalam masyarakat. Pengaruh Bayesian dalam kontrol adalah model interaksi sosial berdasarkan pengaruh dalam situasi yang tidak pasti, sehingga terdapat ketidakpastian dalam model dapat dikaitkan dengan gangguan pada tatanan sosial akibat dari tekanan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan pada tatanan sosial.

Institusi memiliki setidaknya dua fungsi dalam mengatur hubungan sosial, memberikan rasa aman kepada masyarakat

dan menjadi teladan bagi norma dan nilai kelompok. Ketidakpercayaan institusional melemahkan kedua fungsi ini dan dengan demikian menghasilkan serangkaian dampak sosial yang negatif dengan mempengaruhi hubungan antarpribadi, intrakelompok, dan antarkelompok. Secara khusus, ketidakpercayaan terhadap institusi mengurangi kepercayaan di antara orang asing, mengurangi kerja sama, kohesi, dan perilaku pro-sosial dalam kelompok, serta meningkatkan prasangka dan konflik antar kelompok, polarisasi dan ekstremisme. Kami menyimpulkan bahwa ketidakpercayaan institusional dan teori konspirasi mengikis tatanan sosial (van Prooijen et al., 2022).

Studi sosiologis tentang struktur sosial adalah salah satu aspek mendasar dari sosiologi. Struktur sosial adalah tatanan dan pola hubungan sosial yang mengatur interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat. Struktur sosial adalah kerangka yang memberikan landasan bagi tingkah laku dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Studi sosiologis tentang struktur sosial adalah salah satu aspek mendasar dari sosiologi. Struktur sosial adalah tatanan dan pola hubungan sosial yang mengatur interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat. Struktur sosial merupakan hubungan timbal balik antara kedudukan sosial dan peran sosial, yang mengandung makna solidaritas sosial dan keteraturan perilaku sosial serta hubungan sosial dalam masyarakat (Darakay & Murwani, 2021a).

Hubungan dan interaksi sosial sering terjadi dalam konteks kelompok atau komunitas. Kelompok sosial mungkin memiliki motivasi dan norma khusus yang memengaruhi interaksi di antara anggotanya. Komunitas dapat terbentuk atas dasar kesamaan minat, nilai, atau lokasi geografis, dan hubungan di dalamnya sering berperan dalam membentuk identitas individu. Interaksi sosial tidak selalu mulus. Konflik merupakan bagian yang wajar dari interaksi sosial dan dapat timbul karena

adanya perbedaan pendapat, kepentingan, atau nilai. Namun, interaksi sosial juga dapat melibatkan kerja sama dan kerja sama yang penting dalam menciptakan keharmonisan dalam masyarakat (Briliana & Destiwati, 2019).

Secara keseluruhan, hubungan dan interaksi sosial merupakan faktor penting dalam membentuk masyarakat dan budaya. Mereka membentuk dasar untuk memahami bagaimana orang berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk hubungan yang kompleks dalam berbagai konteks sosial. Aspek percakapan dan aspek relasional dari kualitas interaksi sosial juga sering dikaitkan dengan peningkatan kebahagiaan. Namun, efeknya lebih besar dan lebih konsisten dalam laporan diri pada variabel kualitas, asosiasi intra-individu dan proyeksi prediksi keterhubungan sosial (Hadi & Dense, 2022). Pada akhirnya, meskipun banyak hubungan antara introvert dan ekstrovert serupa, temuan kami menunjukkan bahwa introvert mungkin mengalami peningkatan hubungan sosial yang lebih besar daripada ekstrovert saat terlibat dalam percakapan yang lebih dalam. Studi ini memberikan bukti kuat untuk banyak metode yang mendukung hubungan antara interaksi sosial dan kesejahteraan, terutama melalui interaksi yang lebih sering dan lebih dalam (Sun et al., 2020).

Struktur sosial adalah pola yang mengatur hubungan dan posisi individu dan kelompok dalam masyarakat. Struktur sosial yang dominan dipengaruhi oleh faktor keturunan, pekerjaan, agama, suku, dan sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan dan struktur sosial memiliki hubungan yang sangat erat (Ibrahim, 2018). Hal ini mencakup hierarki, norma, peran sosial, dan institusi yang membentuk kerangka interaksi sosial dalam suatu kelompok atau masyarakat. Contohnya termasuk kelas sosial, kelompok etnis, sistem politik, dan organisasi keagamaan. Struktur sosial mengacu pada pola dan organisasi yang ada dalam masyarakat yang mempengaruhi interaksi antara individu dan kelompok. Ini adalah kerangka

yang mengatur bagaimana elemen masyarakat berhubungan satu sama lain, membentuk hierarki, dan mempengaruhi distribusi kekuasaan, sumber daya, dan status. Struktur sosial dapat mencakup beberapa aspek (Zellweger et al., 2019). Stratifikasi sosial yang mengacu pada pembagian di masyarakat ke dalam kelas yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti kelas sosial, status, dan kekayaan. Kelas sosial dapat mempengaruhi akses terhadap peluang dan sumber daya.

Kelompok sosial yang mengacu pada struktur sosial yang melibatkan kelompok sosial yang membentuk bagian penting dari masyarakat, seperti keluarga, teman, komunitas, dan institusi. Status sosial: mengacu pada posisi relatif individu atau kelompok dalam hierarki sosial. Status dapat bersifat tertentu, seperti status pekerjaan, status ekonomi, atau status sosial lainnya. Peran sosial mengacu pada setiap status membawa peran tertentu yang diharapkan oleh masyarakat. Peran ini termasuk tanggung jawab, tugas, dan harapan yang terkait dengan keadaan tertentu (Utami, 2021).

Norma dan nilai mengacu pada struktur sosial juga dipengaruhi oleh norma dan nilai yang mengatur perilaku manusia. Norma-norma ini berkontribusi pada pemeliharaan tatanan sosial. Organisasi sosial, mengacu pada Institusi seperti pendidikan, agama, keluarga, ekonomi, dan politik merupakan bagian dari struktur sosial yang membantu mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Hirarki mengacu pada struktur sosial menciptakan hierarki atau tatanan yang mengatur distribusi kekuasaan, pengaruh, dan sumber daya dalam masyarakat (Kuddus, 2020). Dengan memahami struktur sosial, sosiologi berusaha menganalisis bagaimana hubungan antara faktor-faktor tersebut mempengaruhi interaksi sosial, norma, nilai, dan perubahan dalam masyarakat. Struktur sosial memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial dan membimbing perilaku individu dan kesempatan dalam masyarakat.

## 2.5. Pola Perilaku Masyarakat Pada Konteks Sosiologi

Pola perilaku dalam masyarakat mengacu pada cara yang konsisten di mana individu dan kelompok bertindak sesuai dengan norma, nilai, dan harapan sosial yang ada. Ini mencakup tindakan sehari-hari, norma ritual, ritual dan praktik budaya yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari suatu kelompok atau masyarakat (Sihotang & Putri, 2022). Pola perilaku dalam masyarakat, dalam konteks sosiologi merujuk pada trend atau kecenderungan yang tampak pada cara individu dan kelompok berperilaku. Pola perilaku mencerminkan norma, nilai, dan aturan sosial yang mengatur interaksi dan tindakan dalam masyarakat. Pola perilaku sosial dapat mencakup banyak hal, antara lain:

Ritual dan tradisi adalah contoh pola perilaku yang khas dalam masyarakat. Ini bisa berupa upacara keagamaan, perayaan budaya atau kegiatan sehari-hari yang mengikuti urutan tertentu. Situasi komunikatif yang terjadi dalam tradisi tersebut memiliki ciri yang beragam, antara lain aspek sakral, keceriaan, nuansa magis yang kuat dan suasana akrab. Tindakan komunikasi ini mencakup semua aspek komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, serta berbagai simbol yang digunakan (Naraswari & Aprianti, 2021).

Standar masyarakat yaitu norma sosial adalah pedoman yang mengatur perilaku yang diterima dan diharapkan dalam masyarakat. Pola perilaku sering dikaitkan dengan bagaimana orang mematuhi atau melanggar norma-norma ini. Perubahan tidak bisa dihindari, tidak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan ini telah merambah ke berbagai aspek kehidupan dengan dampak positif dan negatif yang berbeda-beda. Akselerasi perubahan yang terjadi saat ini tidak lepas dari perkembangan teknologi dan komunikasi yang salah satunya dipengaruhi oleh perubahan sosial seperti gaya hidup masyarakat, pola komunikasi dan perilaku. Perubahan sosial ini tentunya berdampak pada aspek lainnya (Ahmad Riva'i, 2021).

Peran sosial yang diharapkan secara sosial dari individu dari status sosial yang berbeda juga membentuk pola perilaku. Sebagai contoh, peran ibu dalam keluarga memiliki pola perilaku yang berbeda dengan seorang mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Kebiasaan individu dan kelompok dari rutinitas sehari-hari, seperti makan, berpakaian, dan berkomunikasi, juga membentuk pola perilaku. Keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok berdasarkan situasi tertentu juga menciptakan pola perilaku.

Stratifikasi sosial mengacu pada pola perilaku juga dapat dipengaruhi oleh stratifikasi sosial, dimana kelompok yang berbeda status sosial dapat memiliki pola perilaku yang berbeda dalam masyarakat. Perubahan sosial mengacu pada pola perilaku dapat berubah seiring waktu karena perubahan norma, nilai, teknologi, atau situasi sosial lainnya. Memahami pola perilaku dalam masyarakat merupakan bagian penting dari analisis sosiologis, karena membantu mengidentifikasi pola dan interaksi yang membentuk kehidupan sosial. Pola perilaku mencerminkan dinamika kompleks antara individu, kelompok, dan struktur sosial yang membentuk masyarakat.

Perkembangan budaya mengacu pada perkembangan dan perubahan nilai, norma, tradisi, bahasa, dan aspek lain dari kehidupan sosial suatu masyarakat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti teknologi, migrasi, interaksi antar budaya dan perubahan sosial, yang secara bertahap membentuk cara pandang manusia terhadap dunia dan berinteraksi dengan lingkungannya. Stratifikasi sosial mengacu pada pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas berdasarkan faktor-faktor seperti status sosial, kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Ini menciptakan hierarki atau tingkatan yang memengaruhi akses individu atau kelompok ke sumber daya, peluang, dan hak dalam masyarakat. Stratifikasi sosial dapat mempengaruhi kesetaraan atau ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Perubahan sosial adalah perubahan atau transformasi struktur, norma, nilai, dan institusi masyarakat. Ini bisa berupa perubahan kecil seperti tren mode, atau perubahan besar seperti revolusi politik atau perubahan budaya yang mendalam. Perubahan sosial dapat dipicu oleh faktor-faktor seperti teknologi, migrasi, pembangunan ekonomi, perubahan demografis, dan interaksi antar budaya (Irmayani et al., 2019). Struktur sosial adalah kerangka yang memberikan landasan bagi tingkah laku dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Struktur sosial mencakup konsep status dan peran. Status adalah posisi sosial seseorang dalam masyarakat, seperti siswa, karyawan, atau orang tua. Peran adalah peran sosial yang terkait dengan posisi tertentu dan mencakup harapan dan tanggung jawab yang terkait dengan posisi tersebut. Studi kelas sosial mengidentifikasi kelompok sosial berdasarkan faktor ekonomi seperti pendapatan, properti, dan status pekerjaan. Kelas sosial mempengaruhi peluang dan ketersediaan sumber daya dalam masyarakat (Poegoeh & Hamidah, 2016).

Distribusi sosial menggambarkan pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan karakteristik tertentu seperti pendapatan, pendidikan, dan status sosial. Stratifikasi sosial dapat meliputi kelas sosial, status dan kesempatan hidup yang berbeda antar kelompok sosial. Organisasi sosial, memahami struktur dan fungsi berbagai lembaga dan organisasi dalam masyarakat, seperti bidang keluarga, pendidikan, politik dan agama. Kekuatan dalam masyarakat, mencakup analisis distribusi kekuasaan dalam masyarakat, termasuk siapa yang mempengaruhi dan mengendalikan sumber daya utama dan keputusan. Jaringan sosial, memahami hubungan sosial antara individu atau kelompok dalam masyarakat, termasuk ikatan sosial, jaringan, dan interaksi sosial yang mempengaruhi pola perilaku dan komunikasi.

Mobilitas sosial melibatkan perpindahan individu atau kelompok dari satu posisi sosial ke posisi sosial lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Ketergantungan sosial, memahami bagaimana individu dan kelompok dalam masyarakat saling bergantung, termasuk saling ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial. Studi tentang struktur sosial membantu sosiolog memahami pola dan mekanisme yang mengatur kehidupan sosial. Dengan menganalisis struktur sosial, sosiolog dapat mengidentifikasi ketidakadilan sosial, ketimpangan, dan masalah lain dalam masyarakat. Memahami struktur sosial juga penting untuk merancang kebijakan publik yang efektif untuk mengatasi masalah sosial yang ada dan menciptakan masyarakat yang lebih adil.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Riva'i, F. (2021). Perubahan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Organisasi Pendidikan Islam. *CONSIDU*, 1(01). <https://doi.org/10.51192/cons.v1i01.101>
- Irmayani, N. R., Suradi, Jayaputra, A., Mujiyadi, B., Nainggolan, T., Habibullah, Amalia, A. D., Indrajaya, Suhendi, A., Erwinsyah, R. G., As'adhanayadi, B., Iban, A., Oktafiani, I., Saleh, R., & Aruan, N. L. (2019). Pemetaan Sosial Menuju Desa Berketahanan Sosial Melalui Penyuluh Sosial Masyarakat Sebagai Agen Perubahan. In *Puslitbangkesos Kemensos RI*.
- Naraswari, N. P. A. S., & Aprianti, A. (2021). Aktivitas Komunikasi Ritual Pada Tradisi Omed-Omedan Banjar Kaja Sesetan Denpasar Bali. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1). <https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.19-28>
- Poegoeh, D. P., & Hamidah, H. (2016). Peran Dukungan Sosial Dan Regulasi Emosi Terhadap Resiliensi Keluarga Penderita Skizofrenia. *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v1i12016.12-21>
- Sihotang, Y. E. T., & Putri, M. (2022). Penerapan Kebijakan New Normal dalam Pola Perilaku Masyarakat. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 6(2). <https://doi.org/10.30595/jssh.v6i2.13529>

# BAB 13

## “INTITUSI POLITIK”

---



Oleh Ade Putra Ode Amane

### 13.1. Pendahuluan

**D**alam masyarakat, institusi politik berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur cara kekuasaan politik didistribusikan, dijalankan, dan diawasi. Institusi politik melibatkan berbagai lembaga dan mekanisme yang berkontribusi dalam proses pembuatan keputusan politik, pelaksanaan kebijakan, dan penyelesaian konflik. Fungsi utama dari institusi politik ini adalah untuk memastikan stabilitas, ketertiban, dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat.

Penting untuk memahami institusi politik dalam konteks sosiologi politik karena hal ini membantu kita mengenali

bagaimana kehidupan politik dan sosial diatur dalam masyarakat. Dengan memahami institusi politik, kita dapat menganalisis dinamika kekuasaan, interaksi politik, dan bagaimana keputusan politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pengertian tentang institusi politik menjadi landasan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang peran, fungsi, dan tantangan yang dihadapinya dalam mencapai tujuan politik dan sosial yang lebih baik.

### **13.2. Pengertian Institusi Politik**

Institusi politik adalah struktur dan lembaga-lembaga formal yang berfungsi dalam proses pembuatan keputusan politik, regulasi, dan organisasi kehidupan politik di dalam suatu negara atau masyarakat. Institusi politik adalah bagian integral dari sistem politik suatu negara dan berperan penting dalam menjaga stabilitas, memfasilitasi proses politik, dan menentukan cara kekuasaan diorganisasi dan didistribusikan.

Institusi politik meliputi berbagai lembaga dan mekanisme yang mencakup: (Ramadhani *et al.*, 2022); (Fajar Setyaning Dwi Putra *et al.*, 2022); (Mustanir, Sutiyan, *et al.*, 2023); (Amane, Lopulalan, *et al.*, 2023); (Amane, Razak, *et al.*, 2023); (Mustanir, Ibrahim, *et al.*, 2023)

1. Pemerintahan: Institusi pemerintahan meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berfungsi untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik, membuat undang-undang, serta menegakkan hukum.
2. Partai Politik: Institusi yang mewakili berbagai pandangan politik dan mencalonkan kandidat untuk berkompetisi dalam pemilihan umum dan memperoleh dukungan politik.
3. Birokrasi: Institusi administratif yang bertugas menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

4. Sistem Pemilihan Umum: Institusi yang mengatur proses pemilihan umum untuk memilih pejabat publik dan wakil rakyat.
5. Media Massa: Institusi yang menyediakan informasi politik dan berita kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran publik.
6. Organisasi Masyarakat Sipil: Institusi di luar pemerintahan yang berperan sebagai agen perubahan sosial dan politik, seperti gerakan sosial, kelompok kepentingan, dan organisasi hak asasi manusia.
7. Organisasi Internasional: Institusi politik di tingkat internasional yang berperan dalam kerja sama antar negara dan mengatur isu-isu global.

### **13.3. Fungsi dan Peran Institusi Politik dalam Masyarakat**

Institusi politik memiliki berbagai fungsi dan peran penting dalam masyarakat. Fungsi dan peran ini membentuk dasar struktur politik suatu negara dan mempengaruhi dinamika politik serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa fungsi dan peran utama institusi politik dalam masyarakat:

1. Membuat dan Melaksanakan Kebijakan Publik: Institusi politik, khususnya pemerintahan, bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan publik yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Melalui proses pembuatan keputusan politik, kebijakan ini diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, (Alaslan *et al.*, 2023); (Umiyati, Anwar, Amane, Sipayung, esley L. Hutasoit, *et al.*, 2023).
2. Menjaga Ketertiban dan Keamanan: Institusi politik memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan

keamanan dalam masyarakat. Lembaga-lembaga kepolisian dan militer, yang merupakan bagian dari institusi politik, bertugas untuk melindungi warga negara, menegakkan hukum, dan mengatasi ancaman keamanan.

3. Representasi dan Partisipasi Politik: Institusi politik, seperti partai politik dan sistem pemilihan umum, berfungsi sebagai saluran untuk partisipasi politik warga negara. Partai politik mewakili berbagai pandangan politik dan mencalonkan kandidat untuk berkompetisi dalam pemilihan umum, sehingga memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik.
4. Pengaturan Konflik: Institusi politik membantu mengatasi konflik yang mungkin timbul dalam masyarakat. Melalui proses demokrasi dan mekanisme hukum, konflik politik dapat diatasi secara damai dan menghindari eskalasi kekerasan.
5. Pembagian Kekuasaan dan Checks and Balances: Sistem institusi politik yang berfungsi baik membantu dalam pembagian kekuasaan antara berbagai lembaga pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip checks and balances memastikan tidak adanya kekuasaan yang terpusat pada satu lembaga saja, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
6. Memberikan Pelayanan Publik: Institusi politik, terutama birokrasi, bertugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan publik lainnya, (Guampe, Rosidah, *et al.*, 2023).
7. Mengatur Hubungan Internasional: Institusi politik juga berperan dalam mengatur hubungan dengan negara-negara lain melalui diplomasi, kerjasama internasional, dan keterlibatan dalam organisasi internasional, (Miller, 2006); (Pettiford, 2009); (Hadiwinata, 2017); (Yamin and Haryanto, 2017); (Christmas and Purwanti, 2020).

### **13.4. Pentingnya Memahami Institusi Politik dalam Konteks Sosiologi Politik**

Memahami institusi politik dalam konteks sosiologi politik memiliki beberapa pentingnya, karena hal ini membantu kita untuk: (Damsar, 2015); (Albertus *et al.*, 2022); (Mansyur *et al.*, 2023); (Ahmadin *et al.*, 2023)

1. Menganalisis Dinamika Kekuasaan: Sosiologi politik membantu kita memahami bagaimana kekuasaan didistribusikan, diperoleh, dan dipertahankan di dalam masyarakat. Melalui analisis institusi politik, kita dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh politik dan menguasai sumber daya, serta melihat bagaimana kekuasaan tersebut berubah dari waktu ke waktu.
2. Memahami Peran Lembaga-Lembaga Politik: Sosiologi politik membantu kita memahami peran dan fungsi lembaga-lembaga politik, seperti pemerintahan, partai politik, dan media massa dalam membentuk kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik. Kita dapat melihat bagaimana lembaga-lembaga ini berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi kehidupan politik masyarakat.
3. Menganalisis Isu-Isu Sosial dan Politik: Dengan memahami institusi politik, kita dapat menganalisis isu-isu sosial dan politik yang muncul dalam masyarakat. Misalnya, bagaimana institusi politik menangani isu-isu seperti kesenjangan sosial, hak asasi manusia, lingkungan, dan migrasi.
4. Menilai Efektivitas Kebijakan Publik: Sosiologi politik membantu kita menilai efektivitas kebijakan publik yang diimplementasikan oleh institusi politik. Kita dapat melihat apakah kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan dan menguntungkan bagi masyarakat ataukah menghadapi tantangan dan masalah.

5. Memahami Partisipasi Politik dan Gerakan Sosial: Dengan memahami institusi politik, kita dapat memahami lebih baik tentang partisipasi politik masyarakat dan peran gerakan sosial dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi proses politik.
6. Membantu Perubahan Sosial: Melalui pemahaman tentang institusi politik, kita dapat melihat peluang untuk melakukan perubahan sosial yang lebih baik. Misalnya, bagaimana institusi politik dapat merespons tuntutan masyarakat untuk perubahan kebijakan atau reformasi politik.
7. Mengidentifikasi Tantangan dan Solusi Politik: Sosiologi politik membantu mengidentifikasi tantangan-tantangan politik yang dihadapi oleh masyarakat dan mencari solusi yang tepat melalui proses politik dan partisipasi masyarakat.

### **13.5. Lembaga-Lembaga Politik**

Pengertian lembaga-lembaga politik mengacu pada berbagai struktur dan organisasi formal yang memiliki peran penting dalam kehidupan politik di masyarakat. Lembaga-lembaga politik merupakan bagian integral dari institusi politik suatu negara atau masyarakat, dan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengatur dan mengorganisasi proses pembuatan keputusan politik, pelaksanaan kebijakan, dan pengaturan konflik.

Lembaga-lembaga politik dapat mencakup berbagai jenis dan bentuk, termasuk pemerintahan, partai politik, sistem pemilihan umum, lembaga yudikatif, birokrasi, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Setiap lembaga politik memiliki tugas dan fungsi khusus dalam menciptakan sistem politik yang efektif dan berfungsi dalam masyarakat.

### **13.5.1. Eksekutif**

Eksekutif merujuk pada salah satu cabang pemerintahan dalam lembaga-lembaga politik suatu negara. Cabang eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif atau oleh pihak eksekutif sendiri, serta menjalankan berbagai fungsi pemerintahan sehari-hari. Lembaga eksekutif memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, sehingga memainkan peran kunci dalam mengatur kehidupan politik dan sosial dalam masyarakat.

#### **13.2.1.1 Kepala Negara**

Kepala Negara adalah salah satu peran dalam cabang eksekutif suatu negara dan merupakan simbolik dari kedaulatan dan representasi negara. Kepala Negara dapat memiliki berbagai bentuk, tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Dalam beberapa sistem, kepala negara dan kepala pemerintahan adalah dua peran yang terpisah, sementara dalam sistem lain, keduanya digabung menjadi satu.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai Kepala Negara: (Setiawan and Sulastri, 2017); (Anggara, 2018)

1. Simbolik dan Representasi Negara: Kepala Negara mewakili dan menjadi simbolik dari kedaulatan negara. Ia mewakili kesatuan dan identitas bangsa serta bertindak sebagai representasi tertinggi bagi negara dalam hubungan dengan negara lain dan di tingkat internasional.
2. Peran Seremonial: Kepala Negara sering kali memiliki peran seremonial dan kehormatan dalam masyarakat. Mereka dapat terlibat dalam acara-acara resmi, upacara negara, kunjungan kenegaraan, dan kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat simbolik.

3. **Tugas dan Fungsi:** Peran Kepala Negara dapat bervariasi tergantung pada sistem pemerintahan negara tertentu. Dalam beberapa sistem, Kepala Negara memiliki kekuasaan terbatas dan tugasnya lebih berfokus pada aspek simbolik dan seremonial. Di lain pihak, dalam sistem monarki konstitusional, Kepala Negara adalah seorang raja atau ratu yang memiliki kedudukan simbolik, sedangkan kekuasaan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh kepala pemerintahan, seperti perdana menteri. Dalam sistem republik, Kepala Negara biasanya diwakili oleh presiden yang dapat memiliki peran eksekutif dan seremonial.
4. **Penerus Gelar Kepala Negara:** Dalam monarki, Kepala Negara dapat menjadi penerus gelar kerajaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti Raja atau Ratu, yang membentuk garis keturunan kerajaan tertentu.
5. **Pengaruh pada Citra Negara:** Kepala Negara memiliki peran penting dalam membentuk citra dan persepsi internasional terhadap negara. Mereka dapat memainkan peran sebagai duta penting dalam diplomasi dan hubungan internasional.
6. **Keabsahan dan Legitimasi:** Kepala Negara sering kali dianggap sebagai simbol dari kontinuitas dan stabilitas negara. Mereka membantu memberikan keabsahan dan legitimasi pada institusi pemerintahan dan sistem politik negara tersebut.

### **13.5.2. Kepala Pemerintahan**

Kepala Pemerintahan adalah salah satu peran dalam cabang eksekutif suatu negara yang bertanggung jawab atas tugas-tugas pemerintahan sehari-hari dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam beberapa sistem pemerintahan, peran Kepala Pemerintahan dapat dipisahkan dari peran Kepala

Negara, sementara dalam sistem lain, keduanya dapat digabung menjadi satu.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai Kepala Pemerintahan: (Noviati, 2013); (Kamaroellah, 2014); (Achmad and Thamrin, 2021); (Pelu *et al.*, 2022)

1. Pelaksana Kebijakan Publik: Kepala Pemerintahan adalah individu yang memiliki kekuasaan eksekutif untuk menjalankan dan melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif atau oleh pihak eksekutif sendiri. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan secara efisien dan efektif.
2. Kepala Eksekutif: Kepala Pemerintahan berperan sebagai kepala eksekutif di negara tersebut. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan pemerintahan, pengelolaan administrasi negara, dan penegakan hukum.
3. Tanggung Jawab Pemerintahan Harian: Kepala Pemerintahan memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan dan operasional pemerintahan sehari-hari. Mereka memimpin kabinet atau dewan menteri untuk membahas dan merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah.
4. Peran dalam Kebijakan Publik: Kepala Pemerintahan memiliki peran sentral dalam proses pembentukan kebijakan publik. Mereka dapat mengusulkan kebijakan-kebijakan baru dan memiliki otoritas untuk menandatangani undang-undang atau peraturan menjadi undang-undang.
5. Akuntabilitas dan Transparansi: Kepala Pemerintahan harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Mereka diharapkan beroperasi dengan transparansi dan menjalankan tugas-tugasnya sesuai

dengan hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.DAER

6. Hubungan dengan Cabang Eksekutif Lain: Kepala Pemerintahan berinteraksi dengan lembaga politik lainnya, seperti cabang legislatif dan yudikatif, untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan dan menjaga keseimbangan kekuasaan.
7. Hubungan dengan Kepala Negara: Dalam beberapa sistem pemerintahan, Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara merupakan dua peran yang dipisahkan. Dalam kasus ini, Kepala Pemerintahan bertanggung jawab atas tugas-tugas pemerintahan, sementara Kepala Negara berperan sebagai simbolik dan mewakili negara secara resmi.

### 13.5.3. Legislatif

Legislatif adalah salah satu cabang pemerintahan dalam lembaga-lembaga politik suatu negara. Cabang legislatif bertanggung jawab atas pembentukan dan pembuatan undang-undang, serta memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan terhadap pemerintahan. Lembaga legislatif umumnya disebut sebagai parlemen, majelis, dewan, atau badan perwakilan, tergantung pada sistem pemerintahan negara tersebut.

Berikut adalah beberapa karakteristik dan peran dari cabang legislatif: (Zulkarnaen, 2020); (Pelu *et al.*, 2022); (Mustanir, Salampeasy, *et al.*, 2023)

1. Pembentukan Undang-Undang: Cabang legislatif memiliki wewenang untuk mengusulkan, membahas, dan mengesahkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Undang-undang ini dapat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti kebijakan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
2. Representasi Rakyat: Lembaga legislatif berperan sebagai perwakilan rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Anggota legislatif, yang sering disebut sebagai

anggota parlemen atau wakil rakyat, dipilih oleh warga negara melalui pemilihan umum untuk mewakili kepentingan dan aspirasi warga di tingkat nasional atau regional.

3. Pengawasan Terhadap Eksekutif: Cabang legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap cabang eksekutif pemerintahan. Ini dilakukan melalui proses diskusi, debat, dan pengajuan pertanyaan kepada pihak eksekutif tentang kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan pemerintah.
4. Anggaran dan Keuangan: Cabang legislatif juga memiliki peran dalam menetapkan anggaran negara dan mengawasi penggunaan dana publik untuk memastikan keuangan negara dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas.
5. Mewakili Kepentingan Masyarakat: Anggota legislatif berfungsi sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintahan. Mereka diharapkan mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mengajukan usulan kebijakan untuk kepentingan umum.
6. Pembentukan Kebijakan Publik: Lembaga legislatif juga dapat berperan dalam membentuk kebijakan publik melalui debat dan diskusi. Anggota legislatif membawa berbagai pandangan politik dan berusaha mencapai kesepakatan dalam menyusun kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
7. Peran Pengawas dan Penyelidik: Lembaga legislatif dapat membentuk komisi-komisi khusus untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat, seperti skandal politik atau kejahatan korporasi.

#### **13.5.4. Yudikatif**

Cabang yudikatif adalah salah satu cabang pemerintahan dalam lembaga-lembaga politik suatu negara. Cabang ini bertanggung jawab atas administrasi hukum dan pengadilan,

yang berfungsi untuk menegakkan hukum, menafsirkan undang-undang, dan menyelesaikan sengketa atau kasus-kasus hukum antara pihak-pihak yang berselisih. Yudikatif memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintahan dan individu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berikut adalah beberapa karakteristik dan peran dari cabang yudikatif: (Yani, 2018)

1. **Pengadilan dan Penegakan Hukum:** Cabang yudikatif berfungsi untuk menjalankan sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tanpa prasangka. Pengadilan di bawah cabang yudikatif berperan dalam memutuskan kasus-kasus hukum dan memberikan putusan yang sah berdasarkan fakta dan bukti yang ada.
2. **Independensi:** Cabang yudikatif diharapkan bekerja secara independen dari cabang pemerintahan lainnya, seperti eksekutif dan legislatif. Ini memastikan bahwa putusan pengadilan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak-pihak lain.
3. **Penafsiran Undang-Undang:** Yudikatif memiliki peran dalam menafsirkan undang-undang dan konstitusi negara. Pengadilan harus memahami dan menerapkan hukum dengan tepat untuk memutuskan sengketa dan memastikan keadilan.
4. **Perlindungan Hak Asasi:** Cabang yudikatif memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak asasi manusia. Pengadilan dapat memutuskan apakah tindakan pemerintah atau individu melanggar hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi atau hukum internasional.
5. **Resolusi Sengketa:** Yudikatif berperan dalam menyelesaikan sengketa dan konflik hukum antara pihak-pihak yang

berselisih, baik itu antara individu, perusahaan, atau antara pihak pemerintah dan warga negara.

6. Peran Pengawas: Yudikatif dapat berfungsi sebagai badan pengawas terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan hukum. Pengadilan dapat memeriksa keabsahan tindakan pemerintah dan mengadili kasus-kasus di mana pemerintah dianggap melampaui wewenangnya.
7. Kepatuhan dan Penegakan Hukum: Cabang yudikatif berperan dalam memastikan bahwa putusan pengadilan dipatuhi dan hukum ditegakkan. Keputusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat.

### 13.5.5. Birokrasi

Birokrasi merujuk pada sistem organisasi yang kompleks dan hierarkis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah, pengelolaan administrasi publik, dan penyediaan layanan publik. Sistem birokrasi memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan.

Berikut adalah beberapa karakteristik dan peran dari birokrasi: (Fajrillah *et al.*, 2022); (Bormasa *et al.*, 2023); (Mustanir, Yuyun Alfasius Tobondo, *et al.*, 2023); (Amane, Bagenda, *et al.*, 2023)

1. Struktur Hierarkis: Birokrasi memiliki struktur hierarkis yang terdiri dari berbagai tingkat atau jenjang, mulai dari tingkat paling atas hingga tingkat paling bawah. Setiap tingkat memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang berbeda, dan informasi serta keputusan mengalir dari atas ke bawah.
2. Divisi Tugas: Birokrasi membagi tugas dan fungsi pemerintahan menjadi unit-unit kerja yang lebih kecil, dengan tugas-tugas yang jelas dan spesifik. Setiap unit atau

departemen memiliki tanggung jawab khusus dan bidang kerja yang ditetapkan.

3. **Profesionalisme dan Kualifikasi:** Birokrasi biasanya diisi oleh pegawai atau aparatur yang memiliki kualifikasi, keahlian, dan pengetahuan yang relevan dengan bidang tugas mereka. Pegawai birokrasi diharapkan bekerja secara profesional dan objektif dalam menjalankan tugas-tugasnya.
4. **Biaya Efisiensi:** Birokrasi diharapkan untuk beroperasi secara efisien dan mengelola anggaran publik dengan bijaksana untuk mencapai hasil yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
5. **Pelaksana Kebijakan:** Birokrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh cabang eksekutif atau legislatif. Mereka memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata dan implementasi program-program pemerintah.
6. **Pengawasan dan Evaluasi:** Birokrasi dapat berperan dalam melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dari berbagai kegiatan pemerintahan.
7. **Penyediaan Layanan Publik:** Birokrasi sering bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Mereka harus menyelenggarakan layanan tersebut dengan cermat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **13.6. Etika dan Akuntabilitas dalam Institusi Politik**

Etika dan akuntabilitas dalam institusi politik adalah dua aspek yang sangat penting dalam memastikan integritas dan kualitas pemerintahan yang baik. Etika berkaitan dengan standar moral dan prinsip yang harus dipegang oleh para pemimpin dan pejabat pemerintahan dalam menjalankan

tugas-tugas mereka, sementara akuntabilitas berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab para pejabat pemerintahan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada publik.

### **13.7. Etika Politik**

Etika politik mengacu pada standar moral dan prinsip etika yang berlaku dalam dunia politik dan pemerintahan. Etika politik melibatkan perilaku dan tindakan para pemimpin politik, pejabat pemerintahan, dan aktor politik lainnya dalam menjalankan tugas-tugas mereka untuk kepentingan publik. Ini mencakup sejumlah nilai dan norma yang harus dipegang oleh para aktor politik agar dapat memenuhi tanggung jawab mereka secara etis.

Berikut adalah beberapa aspek penting tentang etika politik:

1. **Integritas dan Kehormatan:** Etika politik menuntut integritas dan kehormatan dari para pemimpin politik. Mereka diharapkan untuk bertindak dengan jujur dan adil, serta tidak terlibat dalam perilaku korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Para pemimpin politik harus beroperasi secara terbuka dan transparan, memberikan akses publik yang luas terhadap informasi dan keputusan politik. Mereka juga harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada publik.
3. **Pelayanan Publik:** Etika politik menekankan bahwa para pemimpin politik harus melayani kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka harus berfokus pada kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
4. **Menghormati Hukum dan Konstitusi:** Para pemimpin politik harus menghormati hukum dan konstitusi negara.

Mereka diharapkan untuk mematuhi undang-undang dan tidak bertindak di luar wewenang yang telah ditetapkan.

5. **Kehormatan Terhadap Lawan Politik:** Etika politik menuntut sikap yang hormat dan santun terhadap lawan politik. Para pemimpin politik harus berkompetisi dengan fair dan menghindari kampanye negatif atau mencemarkan reputasi.
6. **Partisipasi Publik:** Etika politik juga mendorong partisipasi publik dalam proses politik. Para pemimpin politik harus mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi warga negara serta memberikan kesempatan untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan politik.
7. **Keterbukaan terhadap Kritik:** Para pemimpin politik harus terbuka terhadap kritik dan saran dari publik, media, dan pihak lain. Mereka harus menghadapi kritik dengan bijaksana dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan.

### **13.8. Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab para pejabat pemerintahan dan institusi publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada publik atau masyarakat yang mereka layani. Akuntabilitas publik adalah salah satu pilar penting dalam menjalankan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Berikut adalah beberapa aspek penting tentang akuntabilitas publik: (Hendrayady *et al.*, 2023); (Alasan *et al.*, 2023); (Guampe, Rosidah, *et al.*, 2023); (Guampe, Kundhani, *et al.*, 2023)

1. **Transparansi:** Akuntabilitas publik berarti beroperasi secara terbuka dan transparan. Para pejabat pemerintahan harus memberikan akses publik yang luas terhadap

informasi mengenai kebijakan, anggaran, keputusan politik, dan kinerja pemerintah secara keseluruhan, (Hendrayady *et al.*, 2023).

2. **Pertanggungjawaban:** Para pejabat pemerintahan harus memahami bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus siap menjawab pertanyaan dan pertanggungjawaban atas kinerja mereka kepada publik dan badan-badan pengawas yang relevan.
3. **Kepatuhan Hukum:** Akuntabilitas publik menuntut para pejabat pemerintahan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Mereka tidak boleh bertindak di luar wewenang atau melakukan tindakan yang melanggar hukum.
4. **Evaluasi Kinerja:** Para pejabat pemerintahan dan institusi publik harus melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Evaluasi ini harus mencakup penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan dan program yang dijalankan, (Umiyati, Anwar, Amane, Sipayung, W. L. Hutasoit, *et al.*, 2023).
5. **Pengawasan Independen:** Akuntabilitas publik diperkuat oleh adanya lembaga-lembaga pengawas independen, seperti badan pemeriksa keuangan, ombudsman, dan komisi anti-korupsi. Lembaga-lembaga ini berperan dalam memantau kinerja pemerintah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas.
6. **Responsif terhadap Kritik:** Para pejabat pemerintahan harus responsif terhadap kritik dan masukan dari publik, media, dan pihak-pihak lain. Mereka harus bersedia mendengarkan aspirasi masyarakat dan melakukan perubahan jika diperlukan.
7. **Partisipasi Publik:** Akuntabilitas publik juga mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi ini memungkinkan masyarakat untuk

ikut serta dalam menyusun kebijakan dan mengawasi kinerja pemerintahan, (Guampe, Kundhani, *et al.*, 2023).

## DAFTAR PUSTAKA

Achmad, D. and Thamrin, A. (2021) 'Calon Presiden Perseorangan dan Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia', *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(2), pp. 120–132. doi: 10.35905/diktum.v19i2.2393.

Ahmadin *et al.* (2023) *SOSIOLOGI RUANG VIRTUAL*. Pertama. Edited by Ahmadin. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Alaslan, R. T. F. A. *et al.* (2023) *Manajemen Sektor Publik*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Albertus, F. *et al.* (2022) *Sosiologi Komunikasi*. Pertama. Edited by S. A. Rayhaniah. Bandung: Media Sains Indonesia.

Amane, A. P. O., Bagenda, C., *et al.* (2023) *ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN*. Pertama. Edited by N. Rismawati. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Amane, A. P. O., Razak, M. R. R., *et al.* (2023) *ILMU POLITIK*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.

Amane, A. P. O., Lopulalan, D. L. Y., *et al.* (2023) *Pembangunan Politik*. Pertama. Edited by E. Damayanti. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Anggara, S. (2018) *Hukum Administrasi Negara*. Pertama. Bandung: Pustaka Setia.

Bormasa, M. F. *et al.* (2023) *Birokrasi Indonesia*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

- Christmas, S. K. and Purwanti, E. (2020) 'Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), pp. 222–235. doi: 10.14710/jphi.v2i2.222-235.
- Damsar, P. D. (2015) *Pengantar Sosiologi Politik*. 4th edn. Rawamangun: Prenadamedia Grup.
- Fajar Setyaning Dwi Putra *et al.* (2022) *MARKETING POLITIK (Teori dan Konsep)*. Pertama. Edited by N. S. Wahyuni. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Fajrillah *et al.* (2022) *E-GOVERNMENT*. Pertama. Edited by D. Gustian. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Guampe, F. A., Kundhani, E. Y., *et al.* (2023) *KEBIJAKAN PUBLIK (DARI SEJARAH, TEORI, PROSES, DAN PRAKTEKNYA)*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Guampe, F. A., Rosidah, *et al.* (2023) *MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA (PENERAPAN DI ERA INOVASI DIGITALISASI)*. Pertama. Edited by Agus Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Hadiwinata, B. S. (2017) *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Pertama. Jakarta.
- Hendrayady, A. *et al.* (2023) *Manajemen Pelayanan Publik*. Pertama. Edited by D. P. Sari. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Kamaroellah, A. (2014) *Manajemen Pemerintahan Daerah (Konsep, Desain, Teknik Meningkatkan Kerja)*. Surabaya: Pustaka Radja.

- Mansyur, A. I. *et al.* (2023) *SOSIOLOGI PERKOTAAN*. Pertama. Edited by E. Damayant. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Miller, L. H. (2006) *AGENDA POLITIK INTERNASIONAL*. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustanir, A., Yuyun Alfasius Tobondo, *et al.* (2023) *BIROKRASI INDONESIA*. Pertama. Edited by Agus Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Mustanir, A., Ibrahim, M. M., *et al.* (2023) *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Get Press Indonesia.
- Mustanir, A., Sutiyan, O. S. J., *et al.* (2023) *Ilmu Politik*. Pertama. Edited by A. Asari. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Mustanir, A., Salampessy, M., *et al.* (2023) *Sistem Keuangan Pemerintah*. Pertama. Edited by D. P. Sari. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Noviati, C. E. (2013) 'Demokrasi dan Sistem Pemerintahan', *Jurnal Konstitusi*, 10(04), pp. 333–354. doi: 10.31078/jk1027.
- Pelu, H. D. A. *et al.* (2022) 'PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT OLEH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN (Studi Perbandingan Negara Jepang)', *Jurnal Cahaya Keadilan (JCK)*, 10(1), pp. 22–35. doi: 10.33884/jck.v10i1.5516.
- Pettiford, J. S. & L. (2009) *HUBUNGAN INTERNASIONAL: PERSPEKTIF DAN TEMA*. Pertama, *Pustaka Pelajar*. Pertama. Yogyakarta.

- Ramadhani, M. M. *et al.* (2022) *Pengantar Ilmu Politik*. Pertama. Edited by N. Rismawati. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Setiawan, A. and Sulastri, E. (2017) *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. Jakarta: UMJ PRESS.
- Umiyati, H., Anwar, K., Amane, A. P. O., Sipayung, B., Hutasoit, W. L., *et al.* (2023) *Tata Kelola Sektor Publik*. Pertama. Edited by A. Masruroh. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Umiyati, H., Anwar, K., Amane, A. P. O., Sipayung, B., Hutasoit, esley L., *et al.* (2023) *TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK*. Pertama. Edited by A. Masruroh. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Yamin, M. and Haryanto, A. (2017) *Teori Pembangunan Internasional*. Pertama, *Pustaka Ilmu*. Pertama. Yogyakarta.
- Yani, A. (2018) 'Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945', *Legislasi Indonesia*, 15(2), pp. 55–68. doi: 10.54629/jli.v15i2.187.
- Zulkarnaen, Z. (2020) 'Kemitraan Antara Eksekutif Dan Legislatif Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2), p. 245. doi: 10.25157/justisi.v8i2.4070.



# BAB 14

## “PERUBAHAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT”

---



Oleh Arditya Prayogi

### 14.1 Pendahuluan

**M**anusia dalam sejarah panjang peradabannya selalu tumbuh, berkembang dan berjalan secara dinamis mengikuti berbagai perubahan yang terjadi di setiap sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan secara fisik, manusia kemudian beradaptasi dengan lingkungan alam agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jika dicermati lebih jauh, proses adaptasi yang dilakukan manusia ini akan terus dilakukan sebagai bagian dari proses “penyempurnaan” diri agar manusia dapat terus menjaga eksistensinya dan tetap “ada” di tengah manusia

yang lain. Dengan demikian, dalam proses adaptasi ini manusia akan mengerahkan motivasinya untuk menggunakan akal budinya secara maksimal. Hal ini karena, dengan akal budi tersebut, manusia akan senantiasa berpikir untuk bagaimana ia menghadapi proses adaptasi untuk menjaga eksistensinya. dalam proses adaptasi ini juga manusia akan “dipaksa” untuk dapat kreatif tanpa tersekat oleh ruang dan waktu, yang mana ruang dan waktu dalam hal ini tidak saja terbatas dimana ia dilahirkan serta dibesarkan, namun termasuk pula tempat dan waktu lain dimana manusia tersebut dapat menjaga eksistensinya (Lauer, 1993).

Seperti dua sisi mata uang, manusia ialah makhluk individual di satu sisi dan makhluk sosial di sisi yang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lain/sesamanya, yang dalam hal ini satu sama lainnya akan saling berhubungan/berinteraksi. Namun demikian, dalam proses interaksi ini, terdapat dinamika yang berjalan tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini karena tiap manusia –secara individual, memiliki beragam perbedaan satu sama lainnya, utamanya perbedaan karakter dan watak yang sering menjadi pemicu timbulnya kesalahpahaman antar manusia. Dalam hal ini kemudian, setiap individu manusia memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu fenomena perubahan. Meski berbeda, dalam menghadapi fenomena perubahan ini kemudian manusia akan membentuk suatu kelompok yang memiliki cara pandang yang sama. Untuk dapat membentuk suatu kelompok sosial, maka haruslah terdapat berbagai kesepakatan Bersama (Prayogi, 2023). Hal ini karena, perubahan merupakan suatu fenomena yang bersifat dinamis yang mutlak terjadi dalam kehidupan manusia.

Perubahan yang terjadi dalam hidup manusia secara bermasyarakat dapat dipahami sebagai perubahan sosial. Perubahan sosial ini bersifat mutlak karena ia akan dialami oleh setiap masyarakat dimana pun dan kapan pun. Perubahan

sosial ini terjadi karena adanya perbedaan, pun ketidak-sesuaian antara berbagai unsur atau elemen sosial yang ada di tengah masyarakat (Ranjabar, 2006). Perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia ini kemudian terjadi baik dalam konteks interaksi individual maupun secara sosial dalam lingkungan kehidupan manusia. Perubahan-perubahan ini paling tidak dapat –secara sederhana dapat diidentifikasi jika menilik aspek *tempus*. Waktu menjadi aspek penting yang menandai terjadinya perubahan sosial, baik secara mikro maupun makro. Yang membedakan dalam perubahan sosial ini ialah aspek kecepatan maupun laju terjadinya perubahan itu. Termasuk pula pada aspek cakupan, perencanaan, dan berbagai hal terkait dari perubahan sosial itu sendiri.

Perubahan sosial secara konseptual ialah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Dengan demikian perubahan yang dimaksud adalah perubahan tidak hanya terkait aspek sosial semata namun juga terkait dengan aspek budaya, karena memang manusia selain sebagai makhluk sosial juga tidak terlepas dari kebudayaan (Prayogi & Prasetya, 2023). Secara luas, konsep perubahan sosial merupakan suatu konsep yang memiliki dimensi yang sangat luas. Hal ini dapat dilihat dari beragam pendapat ahli yang memberikan pemahaman yang berbeda satu sama lainnya terkait perubahan sosial. Wilbert More misalnya, memaknai perubahan sosial sebagai suatu perubahan penting yang terjadi dalam keseluruhan aspek sosial seperti struktur, pola perilaku dan sistem interaksi sosial, termasuk didalamnya perubahan norma, nilai, dan fenomena kultural. Ahli lain, Samuel Koenig memaknai perubahan sosial sebagai upaya modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi ini dapat terjadi dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan. Sedangkan Selo Soemardjan memaknai perubahan sosial sebagai suatu perubahan lembaga

kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya yang didalamnya mencakup pula nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku (Soekanto, 1992). Dengan demikian, perubahan sosial dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang terjadi dalam unsur-unsur masyarakat yang mana didalamnya dikaji berbagai hal terkait keseluruhan aspek kehidupan masyarakat secara sosiologis. Tulisan ini dapat mengelaborasi berbagai hal penting serta kembali menyoroti beberapa hal penting yang menjadi pokok dalam konsep perubahan sosial. Hal ini agar fenomena perubahan sosial di masyarakat dapat dipahami dengan lebih utuh lagi.

## **14.2 Dimensi Perubahan Sosial**

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, perubahan sosial dapat pula dipahami sebagai suatu kajian yang mempelajari berbagai perilaku interaksi manusia yang terkait dengan perubahan. Dengan demikian maka titik tekan dalam telaah dari perubahan sosial ialah keseluruhan aspek kehidupan manusia di dalam masyarakat atau meliputi keseluruhan fenomena sosial. Dalam hal ini, poin penekanan atas perubahan sosial berarti adanya suatu hal yang berbeda dari sebelumnya yang untuk dapat mengetahuinya dapat menggunakan telaah berupa sudut pandang dimensi (Suyanto & Narwoko, 2004).

Dalam hal ini paling tidak terdapat tiga dimensi dalam melihat terjadinya perubahan sosial (Martono, 2018), antara lain *pertama*, dimensi kultural. Pada dimensi ini, perubahan yang terjadi dalam masyarakat terjadi dalam bentuk perubahan kebudayaan, seperti dengan adanya penemuan-penemuan baru dalam penciptaan budaya (material dan immaterial), pengembangan hasil budaya, termasuk pula teknologi, serta (dengan) adanya difusi kebudayaan dalam berbagai cara. Secara prosedural, dimensi kultural dalam perubahan sosial kemudian memicu terjadinya inovasi dalam kebudayaan.

Inovasi kebudayaan ini muncul dengan penanda adanya teknologi baru sebagai respon atas semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat yang dapat mengubah gaya hidup dalam bermasyarakat. Pasca terjadinya inovasi, muncul proses difusi yang merupakan komponen eksternal yang dapat menggerakkan terjadinya perubahan sosial. Dengan difusi, suatu kebudayaan mendapatkan pengaruh dari kebudayaan lain yang kemudian akan berdialektika dan memicu terjadinya perubahan sosial dalam bentuk penerimaan unsur-unsur budaya baru dari luar tersebut.

Keseluruhan proses tersebut meniscayakan adanya peningkatan integrasi berbagai unsur baru ke dalam bentuk kebudayaan yang telah ada di masyarakat sebelumnya. Perubahan dalam dimensi kebudayaan ini juga meniscayakan adanya perubahan bentuk budaya secara dinamis sesuai dengan proses alur budaya. Selain itu, perubahan kebudayaan ini sendiri merupakan hal yang melekat dalam perubahan sosial. Baik perubahan kebudayaan maupun perubahan sosial bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun demikian, tetap perlu ditekankan bahwa perubahan kebudayaan sejatinya terjadi dengan mengacu pada perubahan berbagai pola perilaku budaya (dan teknologi serta ilmu pengetahuan), baik dalam bentuk material maupun immaterial.

*Kedua*, dimensi struktural. Perubahan dalam dimensi struktural harus dipahami sebagai sebuah proses yang mengubah bentuk lama secara struktural dalam bentuk modifikasi struktur masyarakat secara konsisten. Pada dimensi ini, perubahan sosial yang terjadi mengacu pada adanya berbagai perubahan dalam bentuk struktur masyarakat yang terkait dengan peran, kelas, serta lembaga sosial. Secara konseptual, peran sosial dalam dimensi struktural mengalami perubahan/perkembangan dalam bentuk munculnya berbagai peran baru. Munculnya hal “baru” ini tidak hanya ada dalam

aspek peran sosial semata, namun juga konteks kelas dan lembaga sosial. Secara praktis, perubahan dalam dimensi struktural ini dapat dilihat dari adanya berbagai fenomena yang utamanya terkait dengan peran sosial seperti penambahan maupun pengurangan kadar peranan dalam masyarakat, menyangkut pula aspek perilaku serta kekuasaan, adanya kategorisasi atas peran sosial, terjadinya pergeseran wadah peranan, terjadinya modifikasi atas saluran komunikasi di berbagai kategorisasi peran, dan terjadinya perubahan dari sejumlah tipe serta daya suatu fungsi peranan sebagai bagian dari struktur sosial.

*Ketiga*, dimensi interaksional. Pada dimensi ini perubahan sosial yang terjadi mengacu pada adanya perubahan pola hubungan sosial di dalam masyarakat. Perubahan sosial dalam dimensi ini meniscayakan terjadinya modifikasi dan perubahan struktur sosial, serta berbagai komponen dalam masyarakat bersamaan dengan pergeseran kebudayaan yang membawa perubahan di dalam relasi sosial. Secara praktis, perubahan sosial dalam dimensi interaksional ini dapat dilihat dari adanya perubahan dalam frekuensi, peralatan, keteraturan, jarak sosial, serta peran undang-undang, yang mana kesemua hal tersebut merupakan bagian dari dimensi spesifik dalam perubahan relasi-interaksi sosial. Hal ini berarti relasi-interaksi sosial merupakan bagian dari perubahan sosial yang dapat dianalisa.

Selain merujuk pada relasi sosial dalam masyarakat, dimensi interaksional meliputi pula pada aspek perubahan dalam intensitas atau frekuensi serta penggunaan bahasa sebagai medium komunikasi. Dalam hal ini, perubahan ini juga terkait dengan perkembangan teknologi dimana teknologi hari ini menyebabkan berkurangnya frekuensi individu manusia untuk dapat berinteraksi-berbahasa lisan secara langsung. Peran teknologi pada akhirnya telah mengubah frekuensi dan pergeseran penggunaan bahasa dalam melakukan interaksi

secara langsung. Teknologi menjadikan interaksi tetap dapat terjalin dengan baik tanpa terikat dengan seberapa intens interaksi tersebut terjadi serta tanpa terkait dengan berbagai penggunaan bahasa. Pendek kata, perkembangan teknologi saat ini telah sedemikian maju sehingga mengakibatkan manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara individual tanpa harus berinteraksi secara langsung dengan individu yang lain.

Jika ditelaah, perubahan sosial dalam tiap dimensi ini sejatinya berjalan secara interdependensi. Masing-masing dimensi ini sejatinya tidak dapat dipisahkan. Jika dilihat dari dimensi struktural dan kultural misalnya, suatu perubahan yang terjadi struktural sejatinya memberikan tanda bahwasanya di saat yang sama juga sedang terjadi perubahan secara kultural. Keduanya berjalan secara simultan secara empiris sehingga sulit untuk dapat dibedakan satu sama lain. Meski demikian, pada tataran teoritis keduanya berbeda, dimana perubahan dalam dimensi kultural lebih mudah terjadi karena ia lebih bersifat material jika dibandingkan dengan perubahan dalam dimensi struktural yang cenderung lebih abstrak-immaterial. Di sisi yang lain, perubahan dalam dimensi interaksional memberi tanda sekaligus terhadap dua dimensi sebelumnya, dimana dimensi interaksional merupakan dampak langsung dari terjadinya perubahan pada dua dimensi lainnya. Semisal, interaksi-relasi sosial di masyarakat dapat terjadi dalam bentuk tertentu akibat adanya perubahan dalam dimensi struktural. Pun, interaksi-relasi sosial ini juga dapat terjadi karena adanya perubahan dalam sistem kultural di masyarakat. Pendek kata, ketiganya dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang sama, yang untuk menelaahnya perlu untuk melihat dari tataran mana perubahan sosial tersebut dapat dideskripsikan.

### 14.3 Agen Perubahan

Mengingat fenomena perubahan sosial merupakan fenomena yang lekat dalam kehidupan manusia, maka perubahan sosial –terlebih di era 5.0 seperti saat ini, akan terus bergerak cepat dengan berbagai dinamikanya yang semakin kompleks. Perubahan sosial ini kemudian dapat ditangkap sebagai suatu peluang maupun tantangan dalam menghadapi berbagai persaingan yang saat ini juga semakin ketat yang untuk dapat dijalani dengan baik maka harus dapat melakukan suatu perencanaan sosial (*social engineering and social planning*). Dengan demikian, akan muncul pihak-pihak yang (kemudian) dipercaya untuk dapat memimpin perubahan agar berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pihak-pihak inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *Agent of Change* atau agen perubahan.

Agen perubahan dapat diartikan sebagai pihak (orang maupun kelompok) yang membantu terlaksananya suatu perubahan sosial dalam bentuk inovasi yang terencana. Agen perubahan dalam hal ini menjadi katalisator dan pengelola atas suatu perubahan sosial. Secara lebih spesifik, agen perubahan ini dapat dipahami sebagai pihak yang memiliki kemampuan profesional dalam membantu tugas perencanaan pembangunan, atau membentuk kembali berbagai hal yang diperlukan untuk dapat mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu proses perubahan sosial di tengah masyarakat (Soekanto, 1992; Wibowo, 2006).

Secara konseptual, terdapat tiga bentuk agen perubahan antara lain agen perubahan internal, agen perubahan eksternal, serta agen perubahan interna-eksternal. Agen perubahan internal berarti pihak yang secara khusus dilatih serta memiliki kemampuan dalam melakukan pengembangan secara internal-kelembagaan masyarakat. Sedangkan, agen perubahan eksternal berarti pihak dari luar-eksternal kelembagaan masyarakat yang diberi tugas untuk memberikan tenaga

profesionali terkait dinamika perubahan sosial. Terakhir, agenperubahan sosial internal-eksternal dapat diartikan sebagai upaya perpaduan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar kelembagaan masyarakat dengan pertimbangan utama mengambil kelebihan dari masing-masing pihak untuk saling menutupi kekurangan satu sama lain. Ketiga bentuk agen perubahan ini kemudian dapat bersinergi satu sama lain - maupun secara individual, untuk menjalankan berbagai perannya.

Peran awal agen perubahan sosial ialah peran dalam peningkatan efektifitas dalam pembangunan, yang dilakukan dengan cara membangun komunikasi yang antar pemangku kepentingan. Dalam hal ini, agen perubahan dapat menginisiasi pembentukan kelompok sosial secara kelembagaan yang beranggotakan dari berbagai macam latar belakang yang dapat saling bekerjasama dalam membentuk inovasi untuk menghadapi dinamika perubahan sosial. Pembentukan kelompok sosial yang diinisiasi oleh agen perubahan ini pada dasarnya ialah upaya penting dalam memunculkan agen-agen perubahan lain -sebagai bagian integral masyarakat, dalam rangka upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan potensi, peluang, tantangan, serta kendala yang muncul dalam proses perubahan sosial.

Selain itu, *Agent of change* secara konseptual juga memiliki berbagai peran yang dijalani dalam mengelola suatu perubahan sosial. Diantara beragam peran agen perubahan ini antara lain, *pertama* sebagai katalisator atau penghubung. Dalam hal ini agen perubahan menjalankan peran untuk menggerakkan masyarakat untuk melakukan suatu perubahan sosial yang inovatif yang berdampak bagi masyarakat. *Kedua*, sebagai pemberi solusi (*problem solver*). Dalam hal ini agen perubahan sosial menjalankan peran untuk memberikan jalan keluar/solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat, mengingat proses perubahan sosial juga memiliki sifat regres

ataupun berdampak negatif di masyarakat yang dengannya harus dicari solusinya. *Ketiga*, sebagai pemberi pertolongan. Dalam hal ini kemudian, agen perubahan tidak hanya mencukupkan diri pada upaya memberi solusi. Ia harus dapat terjun secara langsung untuk memberikan kontribusi riil berupa upaya pertolongan dalam dinamika perubahan sosial, meski pertolongan yang diberikan tersebut juga akan sangat tergantung dengan kondisi riil di tengah masyarakat itu sendiri. *Keempat*, sebagai penghubung atas sumber daya perubahan (*resources linker*). Dalam hal ini kemudian, agen perubahan dapat menjalankan peran dengan membentuk jejaring yang saling terhubung untuk mengatasi berbagai kendala maupun dinamika yang muncul dalam perubahan sosial (Rogers, 1983). Jejaring ini dibutuhkan mengingat sifat perubahan sosial itu sendiri yang kompleks yang tidak dapat hanya dilihat dari satu sudut pandang semata.

#### **14.4 Penutup**

Sebagai bagian dari kajian sosiologi, perubahan sosial sebagai sebuah proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa berlangsung tanpa henti dan akan terus berlangsung bersamaan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Perubahan sosial sendiri dapat diidentifikasi terjadi secara sosiologis jika terdapat perbandingan antara kondisi sosial masyarakat saat ini dengan kondisi di masa lampau. Meski demikian, patut dipahami bahwasanya inti dari perubahan ini ialah keinginan tiap individu untuk senantiasa berubah menjadi/berada dalam kondisi yang lebih baik (progres) dan senantiasa baik sesuai dengan kebutuhan atas apa yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, karena perubahan merupakan hal yang pasti terjadi, maka perubahan sosial juga pada hakikatnya merupakan proses yang terus berlangsung dengan mengambil berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat seperti nilai,

norma, struktu, maupun aspek-aspek penting lain pada suatu masyarakat.

Sebagai sebuah proses, perubahan sosial dalam suatu masyarakat bukanlah merupakan sebuah hasil atau produk jadi. Terdapat proses terjadinya kesepakatan atau keputusan bersama yang diambil dari setiap individu atau kelompok masyarakat. Keputusan yang diambil tentu saja yang sesuai dengan keinginan atau harapan kelompok agar perubahan sosial itu dapat terwujud. Berbagai (kesepakatan) perubahan pada masyarakat ini dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Perubahan yang terjadi pun erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat serta terjadinya suatu budaya yang muncul beriringan dengan terjadinya suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu setiap masyarakat pasti akan selalu mengalami perubahan, baik perubahan secara cepat maupun lambat. Kehidupan manusia tidak hanya berhenti dalam satu titik saja, namun akan terus berputar sejalan dengan tuntutan perubahan zaman yang semakin modern.

Adanya perubahan tatanan masyarakat yang terjadi, baik secara sadar ataupun tidak, cepat atau lambat, dapat berlangsung dengan sendirinya maupun disengaja, tentunya terjadi dengan memperhatikan berbagai faktor pendukung sekaligus penghambat yang mempengaruhi perubahan sosial tersebut. Ditambah dengan kemajuan yang semakin pesat dan didukung perkembangan arus teknologi dan informasi, maka ini akan merubah tatanan sosial masyarakat semakin cepat, dan tentu ini akan membuat masyarakat mempertahankan eksistensi sosial saat ini dalam kehidupannya, apalagi yang berada dalam lingkungan agama dan budaya yang kuat untuk menjaga dan melestarikan berbagai nilai yang sudah baku dan mapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budijarto, A. (2018). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 34, 5-21.
- Prasetya, D., & Prayogi, A. (2022). Implikasi Konvergensi Media Terhadap Konsepsi Dan Peran Khalayak. *ARKANA: Jurnal Komunikasi dan Media*, 1(02), 61-70.
- Etzioni-Halevy, E., & Etzioni, A. (1994). *Social Changes: Sources, Patterns, and Consequences*. New York: Basic Book.
- Ghufron, M. A., Prayogi, A., & Nurdianingsih, F. (2023). BUILDING ONLINE LEARNING COMMUNITY IN SYNCHRONOUS AND ASYNCHRONOUS LEARNING MODELS. *PROJECT (Professional Journal of English Education)*, 6(1), 142-151.
- Jurdi, S. (2012). *Awal Mula Sosiologi Modern Kerangka Epistemologi, Metodologi, dan Perubahan Sosial Perspektif Ibn Khaldun*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Lauer, R. H. (1993). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. (Alimandan, Trans.) Jakarta: Rineka Cipta.
- Maiwan, M. (2015). Interaksi Internasional dalam Perspektif "Determinisme" Geografi: Pandangan dan Kritik. *SPATIAL Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi*, 14(2), 30-37.
- Martono, N. (2018). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Postkolonial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Patty, D. (2005). *Pengantar Sosiologi*. Kupang: CV. Kasih Indah.
- Prajawahyudo, T., Asiaka, F. K., & Nopembereni, E. D. (2022). PERUBAHAN SOSIAL BIDANG PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF MATERIALISTIS DAN IDEALIS. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 8(2), 305-320.

- Prayogi, A. (2023). REVIEWING THE IDEA OF ISLAMIC ETHICAL PARADIGM OF PROPHETIC SCIENCE THINKING KUNTOWIJOYO. *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service*, 1(1), 31-44.
- Prayogi, A. (2023). Social Change in Conflict Theory: A Descriptive Study. *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 37-42.
- Prayogi, A., & Prasetya, D. (2023). Humans as Cultured, Ethical, and Aesthetic Beings: A Conceptual Study. *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(2), 14-22.
- Ranjabar, J. (2006). *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of Innovations*. London: The Free Press .
- Rosana, E. (2015). MODERNISASI DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL. *Al-Adyan Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(1), 67-82.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2010). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (1992). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, B., & Narwoko, J. D. (Eds.). (2004). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Wibowo. (2006). *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



**Catatan:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## “BIODATA PENULIS”

---



**Sangputri Sidik, S.Pd., M.Pd**

Penulis lahir di Soppeng pada tanggal 26 Februari 1991. Merupakan anak pertama dari pasangan Muhammad Sidik, S.Pd dan Sudarmin, S.Pd. Menamatkan pendidikan dasar di SD Negeri 167 Togigi pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2006 menamatkan pendidikan menengah di SMP Negeri 3 Watansoppeng. Pada tahun 2009 menyelesaikan pendidikan tingkat atas di SMA Negeri 1 Watansoppeng. Pada tahun 2013 menamatkan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Pendidikan Sosiologi. Pada tahun 2018 menamatkan pendidikan S2 di Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Program Studi Pendidikan Sosiologi. Saat ini berprofesi sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. Mengampu mata kuliah Pengantar Sosiologi, Sosiologi Kesehatan, Sosiologi Keluarga, dan Studi Gender. Email Penulis: [putrisidik@unima.ac.id](mailto:putrisidik@unima.ac.id)



**Dr. Soetji Andari, M.Si.**

Peneliti di bidang Kesejahteraan Sosial  
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Penulis lahir di Bandung 18 Mei 1965. Telah menyelesaikan studi S-1 di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (Poltekesos) 1991, S-2 Kebijakan Kesejahteraan Sosial-KSdK UGM 2005, dan S-3 Sosiologi UGM 2013. Saat ini penulis bekerja sebagai peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak tahun 2022 sebagai Peneliti di bidang Kesejahteraan Sosial. Hasil penelitian terakhir tentang Kebutuhan Nelayan Miskin dalam Pemenuhan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Ujung Tanah, *Role of family and community support in the eliminating restraint of persons with mental illness*, dan *Collaborative Governance in Realizing an Inclusive Workforce for People with Disabilities to Achieve Sustainable Development Goal's*.



**Mahrida, S.H., M.H., M.Kn**

Mahrida, S.H., M.H., M.Kn, lahir di Tumbang Manjul pada tanggal 18 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sejak tahun 2009 s.d sekarang dan selaku Anggota Polri.

Menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) lulus tahun 1999, Pendidikan S-2 Magister Hukum di Pascasarjana UNLAM lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan S-2 Kenotaritan di Unlam lulus Tahun 2018. Sekarang Mahasiswa aktif di S3-IS UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain : Kode Etik Profesi Kepolisian, Sosiologi, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian, Kriminologi, Victimologi, Hak Asasi Manusia, Metode Penemuan Hukum, Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum keluarga, Hukum dan Gender.

Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2009 menangani perkara praperadilan, PTUN, Perdata, Pidana selaku Tim Advokat Kapolda Kalsel.

Pengalaman berorganisasi, menjadi Satgas Perlindungan Perempuan dan anak mewakili Provinsi Kalsel dengan SKEP Menteri Perempuan dan Anak 2017 s.d 2021, Konselor di P2TP2A Intan Biduri Provinsi Kalsel dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020, Tim Pengangkatan Anak dan Adopsi Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun 2016 s.d Tahun 2021, sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Polda Kalsel sejak 2008 s.d 2015, Ketua Pengurus Pusat Koperasi Polda Kalsel (Puskoppolda Kalsel) 2016 s.d sekarang, Forum Puspa Kalsel 2016 s.d sekarang, Assesor (bersertifikat) angkatan pertama pada Assessesment Center Polda Kalsel sejak 2009 s.d sekarang.

Memiliki Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 8 tahun dan Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun.

Buku Hukum hasil Kalaborasi para Dosen se Indonesia (E-book, HAKI dan ber-Sertifikat) antara lain Book Chapter **Penerapan Hukum Bisnis di Indonesia**, tulisan ada pada Bab 3 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha, Oktober 2022 ISBN: 978-623-5488-55-4, Kolaborasi Buku **Hukum Adat**, tulisan ada pada Bab 6 tentang Perkembangan Politik Hukum yang berhubungan dengan Hukum Adat, November 2022, ISBN: 978-623-8102-04-4, Kolaborasi Buku **Hukum Tata Ruang**, tulisan ada pada Bab 5 tentang Partisipasi masyarakat dalam Penataan Ruang, 9 Januari 2023, ISBN: 978-623-8102-72-3, Kolaborasi Buku **Tindak Pidana dalam KUHP**, tulisan ada pada Bab 6 tentang Kejahatan Korporasi, Desember 2022, ISBN: 978-623-8102-24-2, Kolaborasi Buku **Politik Hukum Pemilu**, tulisan ada pada Bab 3 tentang Ius Operatum atau Pelaksanaan Hukum Pemilu, 11 Januari 2023, ISBN: 978-623-8102-82-2, Kolaborasi Buku **Asas-Asas Hukum Pidana**, tulisan ada pada Bab 10 tentang Hapusnya Hak Menuntut Pidana, 6 Pebruari 2023, ISBN: 978-623-198-055-7, Kolaborasi Buku **Sosiologi Hukum**, tulisan ada pada Bab 5 tentang Sosiologi Hukum Max Weber dan Emile Durkheim, 15 Pebruari 2023, ISBN: 978-623-198-081-6, Kolaborasi Buku **Hukum Acara Perdata dan Praktek**

**Peradilan Perdata**, tulisan ada pada Bab 7 tentang *Fungsi, Tujuan dan Jenis-Jenis Putusan Hakim*, 16 Pebruari 2023, ISBN: : 978-623-198-084-7, Book Chapter **Penerapan Hukum Islam di Indonesia**, tulisan ada pada Bab 4 tentang *Penerapan Hukum Perbankan Syariah*, Maret 2023, ISBN : 978-623-8192-15-1, Kolaborasi Buku **Tindak Pidana Korupsi**, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi*, Maret 2023, ISBN: 978-623-198-159-2, Book Chapter Nasional, **Telaah Tematik Hukum Pidana di Indonesia Pasca Disahkannya KUHP Baru**, tulisan ada pada Bab 1 tentang *Pilar Pembaharuan Hukum Pidana dalam KUHP Baru*, 30 Maret 2023, Penerbit CV.Ayrada Mandiri, Makasar (ECHA PROGRES: Lembaga Pengembangan Profesionalisme SDM). ISBN: 978-623-93554-4-9, Kolaborasi Buku **Mengenal Ilmu Hukum Islam**, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Pembagian Hukum Islam*, April 2023, ISBN: 978-623-198-201-8, Kolaborasi Buku **Hukum Pidana Diluar Kodifikasi**, tulisan ada pada Bab 10 tentang *Konsep Tindak Pidana Ekonomi*, Cet.1, Mei 2023, Penerbit PT. Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia), Padang. Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-198-322-0, Kolaborasi Buku **Hukum Perdata Islam Indonesia**, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Poligami : Alasan, Syarat dan Prosedur Poligami*, Cet.1, Mei 2023, , ISBN : 978-623-198-214-8, Kolaborasi Buku **Ilmu Politik**, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Hak Asasi Manusia*, Cet.1, 2023, Penerbit CV.Literasi Nusantara Abadi, Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN : 6238246200, 9786238246205, Kolaborasi Buku **Hukum Kedokteran dan Kehakiman**, tulisan ada pada Bab 4 tentang *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam sistem Peradilan Pidana*, Cet.1, Mei 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia), Padang. Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-198-329-9, Kolaborasi Buku **Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Anak**, tulisan ada pada Bab 11 tentang *Perlindungan Anak dari Kejahatan Dunia*

*Maya*, Cet.1, Juni 2023, Penerbit PT. Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia), Padang. Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-198.355-8, Kolaborasi Buku **Konsep Hukum Indonesia**, tulisan ada pada Bab 16 tentang *Konsep Hukum Syariah*, Cet.1, Mei 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia), Padang. Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-198-243-8.0



**Dr. Tri Yatno, S.Pd.B., M.Si.**

Dosen Sosiologi Agama Buddha  
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya  
Wonogiri Jawa Tengah

Penulis lahir di Wonogiri pada tanggal 24 Oktober 1980. Penulis adalah dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Program studi Dharmacarya (Pendidikan Keagamaan Buddha) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Sosiologi di Universitas Sebelas Maret Surakarta lulus pada tahun 2015, dan pendidikan S3 Kajian Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta lulus pada tahun 2023. Penulis menekuni bidang penelitian dalam bidang sosiologi, budaya, dan agama Buddha. Penulis telah menulis beberapa artikel yang diterbitkan di jurnal nasional maupun internasional. Selain itu penulis juga telah menulis beberapa buku yang telah diterbitkan.



**Godlif Sianipar, Ph.D.**

Dosen Sastra Inggris

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Katolik Santo Thomas

Penulis lahir di Medan tanggal 31 Januari 1970 . Penulis adalah dosen sosiologi pada Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Katolik Santo Thomas. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Filsafat Agama Kristen tahun 1996, dan melanjutkan S2 Sosiologi pada The Catholic University of America, Washington DC tahun 2003. Kemudian melanjutkan ke S3 Sosiologi pada The University of Newcastle, NSW-Australia pada 2012. Penulis menekuni bidang Penelitian yang terkait dengan Modal Sosial dan Sosiologi Agama.



### **Vina Karina Putri, M.Pd.**

Dosen Pendidikan IPS  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Penulis lahir di Kota Bandung tanggal 29 Agustus 1988. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Bina Bangsa. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Sejarah di Universitas Pendidikan Indonesia Kota Bandung pada tahun 2010 dan melanjutkan S2 pada Universitas Indraprasta PGRI Kota Jakarta lulus pada tahun 2020. Saat ini penulis terdaftar sebagai dosen aktif di Universitas Bina Bangsa sekaligus menjabat sebagai Kepala Prodi Pendidikan IPS. Pernah aktif sebagai Guru di SMP/SMK Al Ghifari Kota Bandung, Guru di SMKN 5 Kota Serang, Guru di MAN 1 Kota Serang. Selain menjadi seorang pendidik, penulis pernah bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pendidikan non formal yakni Helmy Yahya Broadcasting Academy Kota Bandung pada tahun 2009-2010. Penulis menekuni bidang Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora. Kecintaannya dalam bidang pendidikan melahirkan inisiasi solutif dengan mendirikan Bimbingan Belajar “Rumah Belajar Juara” bagi siswa siswi SD, SMP dan SMA yang menginginkan intens belajar di luar jam sekolah.



**Dr. Mia Amalia, SH, MH**

Dr. Mia Amalia, SH, MH, merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, Sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan Sarana Prasarana dan Kerjasama di Universitas Suryakencana. Pendidikan S-I Sekolah Tinggi Hukum Suryakencana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana. S3 di Universitas Islam Bandung. UEL Summer School di Vietnam. Membuat beberapa rancangan Perda naskah akademik. Saksi ahli pidana di Polres Cianjur dan Polres Sukabumi. Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Disertasi Doktor dari Kemenristek-Dikti. Menulis di jurnal nasional dan internasional (scopus). Reviwer jurnal nasional. Beberapa buku yang ditulis secara berkolaborasi dengan dosen-dosen di seluruh Indonesia adalah Metodologi Penelitian Hukum, Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum, Perspektif Pengabdian Masyarakat Sebuah Konsep Pengelolaan dan Aplikasi, Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi keilmuan, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Pajak, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Mewujudkan Kesadaran Bayar Pajak Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Pengantar Sosiologi Hukum, Asas-Asas Hukum Pidana, Sumber Hukum Pidana Dalam Pembaharuan

Hukum Pidana Dalam Pendekatan Sosiokultural, Perubahan Sosial di tengah Perkembangan Ekonomi Kawasan Industri Terhadap Hukum Adat Pada Masyarakat Cianjur, Penemuan Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum, Konsep Pemberlakuan, Tantangan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Industri 4.0. Pengantar Antropologi Hukum, Eksekusi Putusan Pidana Anak Dan Pemasarakatan Anak. Dan masih banyak karya yang sudah dipublis oleh penulis.



**Dr. I. Rawati, S.Sos., M.Si**  
Dosen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penulis lahir di Soppeng Sulawesi Selatan tanggal 29 Oktober 1972. Penulis adalah dosen pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 19 November Kolaka Sulawesi Tenggara. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Administrasi Negara di UVRI Makassar, melanjutkan S2 pada UNHAS Makassar Program Studi Sosiologi dan melanjutkan S3 pada UNM Makassar

Penulis menekuni bidang Penelitian dan pengabdian Masyarakat. Sosiologi Pembangunan karya masalah kebijakan dan sosial terhadap Pembanguna ( Buku Monograf), Jurnal Nasional The ExPansion Of Nickel Mining, Environmental Damage and Determinants' of The BajoCommunity Marginalization In Pomalaa Regency. Southeast Sulawesi



**Dr. Henny Saida Flora SH., M.Hum.,  
M.Kn. CCD. CMC, MH.Kes**

Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Penulis aktif menulis di Media Cetak, dan juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun Internasional. Penulis juga berprofesi sebagai seorang mediator non hakim . Email: [hennysaida@yahoo.com](mailto:hennysaida@yahoo.com)



**Dr. Nur Aida Kubangun, S.Pd., M.Pd.**

Penulis Lahir di Elat pada tahun 1974. Penulis adalah dosen pada program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Pattimura di Ambon Maluku, Penulis mengambil Program Studi Pendidikan Sejarah S-1 pada Universitas Pattimura Ambon tahun 1993, Pendidikan S-2 pada Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta pada Tahun 2008 dan pendidikan S-3 pada Universitas Negeri Makassar dalam Bidang Ilmu Sosiologi pada tahun 2016 dan memperoleh gelar doktor pada 2020. Penulis sudah menghasilkan beberapa hasil penelitian, buku cetak dan jurnal ilmiah, baik jurnal ter indeks Scopus, Sinta maupun jurnal nasional dan jurnal lokal lainnya, serta berbagai buku ajar yang berkaitan dengan Pendidikan Sejarah, Sejarah dan Sosiologi. Sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan Ilmiah berupa seminar, simposium, lokakarya dan sebagainya, baik pada tingkat internasional, nasional maupun pada tingkat lokal.



**Dr. Apris Ara Tilome, S.Ag., M.Si**

Dosen Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Penulis lahir di Kaidundu 16 Januari 1974. Tahun 2008 sampai sekarang sebagai dosen di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Penulis lulusan STAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 1998 jurusan Tarbiyah. Tahun 1999 melanjutkan studi Program Pascasarjana S2. UMM-Malang Prodi Sosiologi Pedesaan. Tahun 2015 mengambil program Doktor (S3. Sosiologi) di Universitas Negeri Makassar. Selain sebagai Dosen, Penulis menekuni Penelitian sosial dan Pengabdian masyarakat.

**Karya Ilmiah Penulis:**

1. **Jurnal International** (2023). Employee Professionalism in the Bureau General Planning and Budget Polda Gorontalo. *Journal La Sociale*, 4(2), 52-59.
2. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v4i2.806>
3. **Jurnal International** (2023). Relationship between Mother's Parenting Style and Stunting in Toddlers Aged 24-59 Months in the Working Area of the Kwandang Health Center Indonesia.

4. *Novateur Publications*, (1), 414–420. Retrieved from <http://novateurpublication.org/index.php/np/article/view/107>
5. **Jurnal International : Index Scopus.**
6. *Sosial Exchange Of Political Eilites in the Regional Leader Election of Gorontalo Province, Indonesia Tahun 2020*.ISSN:0038111X
7. **Jurnal International** : *Building The Enterpreneurial Spirit Of Local Comunity To Manage Lake Limboto As Sustainable Public Asset 2019* : **ISSN: 2685-7405**
8. **Jurnal Internasional** : *Initiative of Thoughts From Indonesia to the World of the Covid-19 Era. 2019*; **ISBN:978-93-87901-08-7**
9. **Jurnal International** : *Polahi Tribe Inbreeding Culture in Gorontalo Tahun 2019*;
10. **Jurnal International** : *Transactional Politics in Election of Regional Heads in Gorontalo Province Tahu 2019*: **SJHSS-237-2018.**
11. **Jurnal International** : *Transaksi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo 2015*
12. **JURNAL Nasional** : *Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyediaan Air Bersih Di Desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.*
13. **JURNAL Nasional**: *Makna Perkawinan Sedarah Bagi Suku Polahi di Kabupaten Gorontalo Tahun 2019*

Buku: **Kilas Balik UM Gorontalo** ; *Mengemban Amanah Meujudkan Harapan Tahun 2019*. ISBN:978-623-7993-13-1



**Imanuel Besituba, S.Pd., M.Pd**

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Aryasatya Deo Muri. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana dan melanjutkan S2 pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pascasarjana, Universitas Nusa Cendana. Penulis menekuni bidang Penelitian Pendidikan dan Sosial Budaya



## **Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si**

Dosen Program Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Luwuk

Penulis lahir pada tanggal 19 September 1985 di Salati. Penulis adalah anak keempat dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Penulis adalah dosen tetap program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Ia menyelesaikan studi S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis bekerja di bidang ilmu sosial.

Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk periode 2021 – 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – periode saat ini. Bersama teman-teman, penulis menerbitkan kumpulan puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, ia ikut

menulis buku “Metode Penelitian” bersama istri tercinta (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd). Penulis juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam penulisan bab dari berbagai buku. Ia juga berpartisipasi dalam berbagai kemitraan penelitian dengan lembaga negara dan swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email: [putrohade@gmail.com](mailto:putrohade@gmail.com)/[adeputra@unismuhluwuk.ac.id](mailto:adeputra@unismuhluwuk.ac.id) atau dengan aplikasi apa pun ke 085395333301



## **Arditya Prayogi**

Perpustakaan UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

Penulis lahir di Palembang pada tanggal 18 September 1987. Penulis adalah tenaga teknis pada Perpustakaan UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menempuh pendidikan tinggi di bidang Ilmu Sejarah di salah satu PTN di Bandung. Saat ini penulis juga mendalami bidang tulis menulis sebagai bagian dari salah satu profesi yang ditekuni. Penulis dapat dihubungi lewat surel [arditya.prayogi@uingusdur.ac.id](mailto:arditya.prayogi@uingusdur.ac.id)